

BAB I

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

Berpedoman kepada UUD 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tidak termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan pilihan) tetapi melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 25 UUD 23 Tahun 2014.

Namun, sampai saat ini, RPP tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Surat Edaran, Instruksi Menteri Dalam Negeri dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan peralihan pasal 122 ayat (1) PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan." Terkait masalah pendanaan diatur lebih lanjut pada pasal 122 ayat (2) PP No.18 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Selanjutnya, pada pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan umum, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

A. Capaian Pelaksanaan Program

Untuk mendukung urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tahun 2019 dialokasikan anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. **Rp.6.658.985.482,-** dan realisasi sebesar Rp. **6.510.963.435,-** (97,78%), dengan laporan sebagai berikut :

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan melalui 10 Program (5 Program Non Urusan dan 5 Program Urusan).

Program non urusan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.1.208.116.854,- dan realisasi sebesar Rp.1.195.740.433,- (98,98%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur dengan anggaran Rp. 354.415.000,- dan realisasi sebesar Rp. 345.855.061,- (97,58%)
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran Rp. 33.750.000,- dan realisasi sebesar Rp. 33.750.000,- (100%)
- 4) Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran Rp. 134.275.300,- dan realisasi sebesar Rp.123.311.680,- (91,83%)
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp.791.699.006,- dan realisasi sebesar Rp.786.077.669,- (99,29%)

Adapun program urusan yang dilaksanakan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran Rp. 1.546.443.599,- dan realisasi sebesar Rp.1.521.909.072,- (98,41%).
Capaian (output) dari program ini adalah tidak terjadinya konflik bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) di Sumatera Barat melalui :
 - a. Pelaksanaan sosialisasi tentang pewarisan nilai-nilai luhur bangsa bagi 70 orang siswa SLTA/generasi muda se-Kabupaten Sijunjung
 - b. Sosialisasi tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental bagi 60 orang aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan aparatur Kesbangpol Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
 - c. Pembinaan dan penanganan organisasi aliran kepercayaan di Sumatera Barat di 19 kabupaten/kota dan sosialisasi tentang penanganan organisasi aliran kepercayaan bagi 50 orang tokoh masyarakat/agama/pemuda se-Sumatera Barat.
 - d. Pelaksanaan sosialisasi tentang pembauran kebangsaan bagi 50 orang anggota Forum Pembauran Kebangsaan dan Etnis/Paguyuban se-Kabupaten Solok Selatan.
 - e. Pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan bagi 1425 orang siswa SLTA dan Generasi Muda, Wali Nagari, Badan Musyawarah Nagari, Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kanduang, dan Tokoh Masyarakat di 8 kabupaten/Kota di Sumatera Barat. (Kab Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kab Pesisir Selatan, Kota Payakumbuh, Kab Sijunjung, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar).
 - f. Pembinaan ke 19 kabupaten/kota untuk pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten/Kota dan Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan.
 - g. Pelaksanaan rapat koordinasi FKUB yang melibatkan Pengurus FKUB/Tokoh Agama se Sumatera Barat dengan peserta sebanyak 60 orang.
 - h. Penguatan wawasan bela negara bagi 60 orang siswa SLTA/generasi muda se-Kabupaten Lima Puluh Kota dan pelaksanaan fasilitasi pembangunan monumen bela negara di Koto Tinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 2) Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan anggaran Rp.811.612.700,- dan realisasi sebesar Rp.762.482.972,- (93,95%)
Capaian (ouput) dari program ini adalah Peningkatan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui :
 - a. Pelaksanaan rapat koordinasi Tim Kelompok Kerja IDI Provinsi Sumatera Barat yang anggotanya terdiri dari instansi terkait diantaranya Badan Pusat Statistik, Bawaslu, Korem 032/WBR, Polda, LKAAM, BEM KM UNAND, Kejasaaan Tinggi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kanwil Kementerian Agama, Binda, Dinas Kesehatan, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dll.
 - b. Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bagi 75 orang aparatur Kesbangpol, Bagian Hukum dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah

- Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat serta OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Pelaksanaan pendidikan politik masyarakat bagi 150 orang pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Tokoh Masyarakat Perempuan se-Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok.
 - d. Pemantauan tahapan pelaksanaan Pemilu di 19 Kabupaten/Kota di Sumbar.
 - e. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Sumatera Barat dengan peserta rakor sebanyak 175 orang peserta yang terdiri dari Bupati/Walikota se-Sumbar, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sumbar, Polres Kabupaten/Kota se-Sumbar, KPU Kabupaten/Kota se-Sumbar, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumbar, Kepala Badan/Kantor/Bagian Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumbar, Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumbar dan OPD di lingkup Pemprov Sumbar.
 - f. Pelaksanaan rapat verifikasi dana hibah untuk Pilkada 2020 sebanyak 6 kali rapat yang melibatkan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diantaranya Badan Keuangan Daerah, Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Mlik Daerah, Biro Pemerintahan, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau, Biro Hukum, Bappeda, Satpol PP dan Damkar, Inspektorat dan KPU Provinsi Sumatera Barat.
 - g. Verifikasi berkas calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebanyak 2 kali. Adapun hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan Verifikasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :
 - a) **Ennaldi.S.Sos** menggantikan **Wilman Singkuan Dt. Parpatih,S.Sos,M.Hum** dari Partai Demokrat Kota Payakumbuh
 - b) **Budi Harto,S.Ag** yang menggantikan **Arman J.Piliang** dari Partai Golongan Karya Kabupaten Agam karena yang bersangkutan meninggal dunia.
 - h. Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik sebanyak 20 kali.
 - i. Bimbingan Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik bagi 60 orang pengurus parpol yang membidangi bantuan keuangan parpol tingkat Provinsi Sumatera Barat dan pejabat yang membidangi bantuan keuangan parpol pada Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
 - j. Sosialisasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan bagi 60 orang pimpinan ormas terpilih se- Sumatera Barat.
- 3) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dengan anggaran Rp.310.708.000,- dan realisasi sebesar Rp.305.445.246,- (98,31%).
Capaian (ouput) dari program ini adalah menurunnya kasus penyakit masyarakat dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perbuatan maksiat, melalui :
- a. Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Maksiat bagi 60 orang Mahasiswa/i di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Kota Padang, 100 orang generasi muda dan pelajar SMA/SMK se-Kabupaten Padang Pariaman, 100 orang generasi muda dan pelajar SMA/SMK se-Kabupaten Pasaman dan 100 orang generasi muda dan pelajar SMA/SMK se- Kabupaten Agam.
 - b. Koordinasi dan penjangkaran informasi mengenai permasalahan tentang Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Maksiat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
- 4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran Rp.1.294.461.200,- dan realisasi sebesar Rp.1.268.136.062,- (97,97%).
Capaian (output) dari program ini adalah menurunnya jumlah konflik sosial di Sumatera Barat, melalui :

- a. Penyusunan rencana aksi penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial Provinsi Sumatera Barat (B04, B08, dan B012)
- b. Pelaksanaan rapat tim terpadu penanganan konflik sosial sebanyak 5 kali rapat dengan melibatkan instansi terkait
- c. Pelaksanaan rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebanyak 4 kali rapat.
- d. Pelaksanaan rapat tim dengan Forkopimda Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 kali rapat
- e. Tersedianya buku pemetaan potensi konflik di Sumatera Barat
- f. Monitoring dan koordinasi dalam rangka penanganan masalah strategis daerah di 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat
- g. Monitoring dan koordinasi dalam rangka pengawasan dan pencegahan terorisme di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
- h. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing
- i. Pelaksanaan rapat tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing Non Government Organizations (NGO) dan Lembaga Asing di Provinsi Sumatera Barat terkait penyusunan draft Pergub Sumbar tentang Pemantauan Orang Asing bersama instansi terkait diantaranya Biro Hukum, Polda Sumbar, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumbar, Kanwil Kementerian Agama Sumbar, LLDIKTI Wilayah X Sumbar, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Disnakertrans, Dinas PM dan PTSP, Dispora, dan Dinas Sosial Prov Sumbar

- 5) Program Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba dengan anggaran Rp.173.503.823,- dan realisasi sebesar Rp.168.255.240,- (96,97%).

Capaian (ouput) program ini adalah meningkatnya pemahaman aparaturnya dan pihak terkait terhadap bahaya narkoba, melalui :

- a. Sosialisasi Pemberantasan, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba bagi 60 orang mahasiswa/i dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Kota Padang
- b. Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) bagi 75 orang aparaturnya di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- c. Monitoring kasus penyalahgunaan narkoba di 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat
- d. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)

Secara umum, anggaran dan realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.208.116.854	1.195.740.433	98,98
II	Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur	354.415.000	345.855.061	97,58
III	Program Peningkatan	33.750.000	33.750.000	100

	Disiplin Aparatur			
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	134.275.300	123.311.680	91,83
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	791.699.006	786.077.669	99,29
VI	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.546.443.599	1.521.909.072	98,41
	1. Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa			
	2. Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental			
	3. Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat			
	4. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan			
	5. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan			
	6. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan			
	7. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama			
	8. Penguatan Wawasan Bela Negara			
VII	Program Pendidikan Politik Masyarakat	811.612.700	762.482.972	93,95
	1. Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)			
	2. Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik			
	3. Dialog Politik bersama Partai Politik, Ormas dan Tokoh Masyarakat			
	4. Pemantauan Pelaksanaan Pemilu			
	5. Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumbar			
	6. Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol			
	7. Bintek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol			
	8. Sosialisasi dan Pembinaan Ormas			
VIII	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	310.708.000	305.445.246	98,31
	1. Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat			
IX	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.294.461.200	1.268.136.062	97,97
	1. Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya			
	2. Penanganan Masalah Strategis Daerah			
	3. Pengawasan Orang Asing			
	4. Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial			
	5. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme			
	6. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial			
	7. Forum Komunikasi dan Konsultasi Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat			
	8. Forum Diskusi Pimpinan Daerah			

	9. Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat			
	10. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumatera Barat			
X	Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	173.503.823	168.255.240	96,67
	1. Sosialisasi Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba			
	2. Sosialisasi Perda tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba			
	3. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)			

B. Outcome Program

Dengan dilaksanakannya program-program yang mendukung Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada tahun 2019 diperoleh hasil (outcome) dari pelaksanaan program-program tersebut diantaranya :

1. Tersedianya data dan informasi tentang daerah rawan konflik di Sumbar dimana pada tahun 2019 terdapat 129 potensi konflik yang terdata di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Potensi konflik berlatar belakang SDA/lahan sebanyak 50 potensi konflik, berlatarbelakang ekopolsosbud sebanyak 38 potensi konflik, berlatar belakang SARA sebanyak 9 potensi konflik dan berlatar belakang batas wilayah sebanyak 31 potensi konflik. Dari 129 potensi konflik tersebut, sebanyak 15 potensi konflik menonjol yang masih dalam pemantauan Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota dan pihak terkait. Dari 129 potensi konflik yang ada, terdapat 3 peristiwa konflik yang terjadi (menimbulkan bentrokan/kekerasan) diantaranya bentrok antar warga nagari Sumpur dengan warga Bungo Tanjung terkait persoalan tapal batas nagari di Kabupaten Tanah Datar, perusakan tapal batas nagari Kapencong Lubuk Gambir (Kapelgam) dengan nagari Koto Baru oleh masyarakat nagari Kapelgam terkait perselisihan kepemilikan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan dan aksi pengrusakan kendaraan dinas oleh masyarakat nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan pada kegiatan operasi penertiban alat tangkap bagan dan keramba jaring apung di danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar.
2. Meningkatnya hasil capaian pelaporan rencana aksi penanganan konflik sosial Provinsi Sumatera Barat, dimana untuk periode B 04, Sumatera Barat meraih peringkat ke-7 wilayah Sumatera – Jawa. Jika dibandingkan dengan persentase capaian target RA periode B 04 tahun 2018, Sumatera Barat berada pada peringkat 8 wilayah Sumatera – Jawa. Berdasarkan hasil capaian pelaporan rencana aksi penanganan konflik sosial tersebut, untuk periode B 08, Sumatera Barat meraih peringkat ke-5 wilayah Sumatera – Jawa. Jika dibandingkan dengan persentase capaian target RA periode B 04 tahun 2019, Sumatera Barat naik dua peringkat dari peringkat 7 menjadi peringkat 5 untuk wilayah Sumatera - Jawa.
3. Meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yaitu sebesar 75,64%. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah partisipasi masyarakat sebesar 58,65% . Artinya, terjadi kenaikan jumlah partisipasi masyarakat sebesar 16,99% pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
4. Tersedianya data/informasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yaitu sebanyak 3.882.387 jiwa se-Sumatera Barat.
5. Tersalurkannya bantuan keuangan partai politik bagi 11 partai politik hasil pemilu 2014 yang direalisasikan dalam 2 tahap yaitu sebesar Rp. 1.897.780.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). untuk tahap I dan untuk tahap II (September s.d Desember 2019), diberikan untuk 9 Partai hasil Pemilu 2019 sebesar Rp. 950.046.400,- (sembilan ratus lima puluh juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah). Akumulasi jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahap I dan Tahap II Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.847,826.400

(dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

C. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 ditetapkan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat hanya sebagai unsur penunjang untuk pencapaian keberhasilan ketiga aspek tersebut.

D. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat masih mengalami berbagai kendala dan permasalahan, antara lain:

1. Belum sinergisnya program dan kegiatan Kesbangpol Provinsi dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota disebabkan ketidakseragaman nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik di kabupaten/kota (ada yang bergabung dengan BPBD dan bagian dari sekretariat daerah) sehingga sasaran yang akan dicapai dari masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tidak maksimal.

Solusi :

Penegasan kepada masing-masing Kepala Daerah di kabupaten/kota untuk menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Minimnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban umum masyarakat diantaranya pendidikan politik masyarakat, pencegahan dan pemberantasan perbuatannya, pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya bagi generasi muda, pengawasan terhadap aktivitas ormas di daerah serta pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan sehingga angka kriminalitas, penyalahgunaan narkoba dan kasus-kasus penyakit masyarakat lainnya termasuk potensi konflik di Sumbar masih tergolong tinggi.

Solusi :

Dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan khususnya kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja Kepala Daerah.

3. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga capaian kinerja tidak maksimal.

Solusi :

Perlu penambahan jumlah SDM yang berkompeten untuk mendukung pelaksanaan capaian kinerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan,

E. Penghargaan Nasional Yang Diterima

Nihil

F. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2019

Tidak ada rekomendasi DPRD pada Badan Kesbangpol Prov Sumbar terkait LKPJ Tahun 2019

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- 1) **Kegiatan penanganan masalah strategis daerah dengan anggaran sebesar Rp. 127.848.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.124.940.700,00 (97,73%).**

Instansi vertikal yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain BIN Daerah Sumbar, Polda Sumbar, Kejati Sumbar, Korem 032 Wirabraja, Kanwil Hukum dan HAM Prov. Sumbar, ATR/BPN Sumbar, Lanud Padang, Kanwil Pajak Wilayah Sumbar, Bank Indonesia, Badan Pertanahan Nasional Sumbar, dan Bea dan Cukai Teluk Bayur.

- 2) **Kegiatan pengawasan orang asing dengan anggaran sebesar Rp. 265.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.254.442.043,00 (96.02%).**

Instansi vertikal yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain Kantor Imigrasi Kelas I Padang, BIN Daerah Sumbar, Kejati Sumbar, Kanwil Kementerian Agama Sumbar, dan Badan Intelijen Strategis Sumbar

- 3) **Kegiatan penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial dengan anggaran sebesar Rp. 249.236.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.246.349.602,00 (98,84%).**

Instansi vertikal yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain Polda Sumbar, Korem 032 Wirabraja, Kejati Sumbar, BIN Daerah Sumbar, Lantamal II Padang, Lanud Padang, Kanwil Kementerian Agama Sumbar, Kanwil Hukum dan HAM Sumbar, dan Kanwil ATR/BPN Sumbar.

- 4) **Kegiatan pengawasan dan pencegahan terorisme dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 49.376.475,00 (98,75%)**

Instansi vertikal yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

- 5) **Kegiatan pengawasan dan pencegahan konflik sosial dengan anggaran sebesar Rp.61.068.000,00 dan realisasi sebesar Rp.60.308.070 (98,76%)**

Instansi vertikal yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain BIN Daerah Sumbar, Polda Sumbar, Kejati Sumbar, Korem 032 Wirabraja, Kanwil Hukum dan HAM Prov. Sumbar, ATR/BPN Sumbar, Lanud Padang, Kanwil Pajak Wilayah Sumbar, Bank Indonesia, Badan Pertanahan Nasional Sumbar, Bea dan Cukai Teluk Bayur

- 6) **Kegiatan Forum Diskusi Pimpinan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.258.229.800,00 dan realisasi sebesar Rp. 256.514.772,00 (99,34%)**

Instansi vertikal yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain Polda Sumbar, Korem 032 Wirabraja, Kejati Sumbar, BIN Daerah Sumbar, Lantamal II Padang, Lanud Padang, dan Kejati Sumbar.

- 7) **Kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.60.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.58.499.800,00 (97,50%)**

Instansi vertikal yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain Kejati Sumbar, Polda Sumbar, Korem 032 Wirabraja dan Kodim di daerah

- 8) Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumbar dengan anggaran sebesar Rp.70.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.64.771.309,00 (92,53%)**

Instansi vertikal yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain Kanwil Kementerian Agama Sumbar, Polda Sumbar, dan Kejati Sumbar

- 9) Kegiatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumbar dengan anggaran sebesar Rp. 19.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. Rp.14.905.200,00 (78,45%)**

Instansi vertikal yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain KPU Sumbar dan Bawaslu

- 10) Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu dengan anggaran sebesar Rp. 298.596.700,00 dengan realisasi sebesar Rp.279.542.378,00 (93,62%)**

Instansi vertikal yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain KPU Sumbar, Bawaslu, Polda Sumbar, Korem 032 Wirabraja, Kejat Sumbar, dan BIN Daerah Sumbar.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

1. Penanganan Masalah Strategis Daerah

a. Output

Output dari kegiatan ini berupa monitoring dan koordinasi dengan seluruh elemen terkait tentang potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di daerah, untuk menghasilkan rekomendasi sebagai acuan penyelesaian permasalahan. Sepanjang tahun 2019, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring ke kabupaten/kota dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang di daerah untuk memperoleh informasi tentang potensi ATHG maupun penanganannya. Dari monitoring yang dilakukan, terdapat sejumlah isu menonjol yang terjadi di kabupaten/kota di Sumbar pada tahun 2019, sebagai berikut :

a) Pemantauan potensi ATHG di kabupaten/kota menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Situasi dan kondisi Sumbar jelang dilaksanakannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 cukup kondusif. Namun, pada saat pendistribusian logistik pemilu dari KPU RI ke kabupaten/kota di Sumbar, terdapat kendala yakni :

- Adanya potensi keterlambatan penyaluran kekurangan logistik dari pusat ke beberapa TPS yang terletak cukup terpencil di kabupaten Agam dan kabupaten Kepulauan Mentawai, jelang hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Hal ini telah dirapatkan oleh KPU Prov. Sumbar dengan Pemerintah Provinsi Sumbar serta dengan unsur intelijen dan pengamanan daerah Sumbar, namun belum menemukan jalan keluar terbaik.
- Badan Kesbangpol Prov. Sumbar memfasilitasi pertemuan antara KPU Prov. Sumbar dan Bawaslu Prov. Sumbar dengan Gubernur Sumbar untuk mencari solusi terbaik, dan melalui pertemuan itu disepakati bahwa kekurangan logistik pemilu 2019 untuk 2 kabupaten tersebut akan disalurkan melalui jalur udara agar logistik pemilu dapat sampai tepat waktu di kabupaten Agam dan kabupaten Kepulauan Mentawai.

b) Pemantauan situasi dan kondisi pasca pemasangan bagan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Singkarak, Kabupaten Solok.

Adanya pemasangan bagan dan KJA di Danau Singkarak yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat sekitar. Masyarakat menilai penangkapan ikan dengan menggunakan KJA tersebut dapat memusnahkan ekosistem ikan bilih yang ada di Danau Singkarak. Untuk

menghindari konflik, Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok telah melakukan mediasi dan dialog dengan mengundang sejumlah pihak termasuk tokoh tokoh masyarakat setempat untuk mencari solusi. Pada bulan November 2019, Pemprov Sumbar menerbitkan Peraturan Daerah tentang penertiban pemasangan bagan dan KJA. Eksekusi penertiban bagan pertama dilakukan oleh Pemkab Solok bersama Pemprov Sumbar pada tanggal 23 November 2019. Pascaeksekusi, ada sejumlah oknum yang masih melakukan pemasangan bagan dan KJA kembali. Hingga saat ini, situasi dan kondisi di sekitar Danau Singkarak masih terus dipantau oleh Pemprov Sumbar berkoordinasi dengan Pemkab Solok.

c) Pemantauan terkait rencana reaktivasi jalur kereta api Padang – Pulau Air.

Kementerian Perhubungan RI berencana mengaktifkan kembali jalur kereta api yang melewati jalur Pulau Air (kawasan Terendam, Padang). Reaktivasi jalur kereta api ini rencananya akan dilakukan pada awal Januari 2020. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dengan Dinas Perhubungan Prov. Sumbar, diketahui bahwa ada sekitar 200 KK yang bermukim di jalur reaktivasi Pulau Air tersebut. Warga yang bermukim tersebut umumnya memiliki bangunan tanpa ijin berupa rumah tinggal dan semacam ruko/tempat berdagang. Dikhawatirkan akan terjadi penolakan dari warga terhadap rencana reaktivasi jalur kereta api tersebut. Hingga saat ini, situasi dan kondisi di sekitar jalur Pulau Air masih terus dalam pemantauan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar.

d) Pemantauan situasi dan kondisi keamanan di Sumbar pasca terjadinya kerusuhan yang menewaskan warga Minang di Wamena, Papua.

Pada tanggal 23 September 2019, kerusuhan pecah di Wamena, kabupaten Jayawijaya, provinsi Papua. Kerusuhan dipicu oleh adanya provokasi berita bohong berbau rasisme dikalangan masyarakat. Saat kerusuhan pecah, sekelompok massa berpakaian pelajar melakukan aksi pembakaran dan pengrusakan serta melakukan pengejaran terhadap warga Non-Papua, termasuk terhadap warga Sumbar yang tinggal di daerah tersebut. Pascainsiden tersebut, 31 orang dinyatakan tewas dan 10 orang diantaranya merupakan warga Sumbar asal Pesisir Selatan. Pada tanggal 27 September 2019, Wakil Gubernur Sumbar didampingi beberapa pejabat terkait berkunjung ke Wamena untuk melihat langsung kondisi para perantau Minang yang mengungsi di sejumlah titik. Berdasarkan kunjungan tersebut serta mempedomani data yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Prov. Sumbar, terdapat 1.470 orang warga Minang yang kini ada di Wamena dan sebagian besarnya menyatakan ingin kembali ke Sumbar dengan alasan keamanan.

Menanggapi aksi kekerasan tersebut, pemerintah provinsi Sumbar segera melakukan koordinasi dan monitoring terhadap situasi dan kondisi keamanan di Sumbar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekerasan di Wamena terhadap masyarakat Sumbar maupun terhadap keamanan warga Papua yang ada di Sumbar. Berdasarkan data yang diperoleh, ada 118 orang mahasiswa asal Papua yang belajar di Sumbar, dan umumnya mereka merupakan mahasiswa penerima beasiswa dari Dikti.

Pemerintah provinsi Sumbar menghimbau tokoh tokoh masyarakat untuk mampu bersinergi dalam meredam situasi agar tidak ditunggangi oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat memprovokasi suasana yang telah berangsur membaik. Perlu juga diwaspadai gerakan dari kelompok/ormas Islam garis keras yang ingin mengerahkan massa dengan tujuan 'jihad' ke Papua. Untuk Sumbar tidak ada indikasi tersebut karena umumnya warga Sumbar cukup rasional dalam menganalisa

situasi, sehingga tidak terjadi semacam aksi balas terhadap warga Papua yang ada di Sumbar.

e) Pemantauan situasi dan kondisi keamanan menyikapi maraknya aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) KUHP dan revisi UU KPK oleh pemerintah pusat.

- Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di Sumbar.

Pada bulan September 2019, sebagian besar masyarakat menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah mengesahkan sejumlah RUU diantaranya RUU KUHP dan revisi UU KPK. Penolakan tersebut berbuntut aksi unjuk rasa yang masif dan intens terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sumbar. Aksi unjuk rasa di Sumbar dilakukan sejak bulan September 2019 dengan berbagai macam tuntutan terhadap pemerintah. Aksi unjuk rasa terjadi di depan kantor-kantor pemerintah daerah hampir di semua kabupaten/kota di Sumbar.

Pada tanggal 25 September 2019, aliansi BEM se-Sumbar kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Prov. Sumbar di jalan Khatib Sulaiman, Padang. Aksi unjuk rasa tersebut menuntut pemerintah pusat untuk membatalkan pengesahan RUU KUHP dan revisi UU KPK. Aksi semula berjalan dengan tertib. Sejumlah pimpinan DPRD Prov. Sumbar turun menemui mahasiswa untuk mendengarkan dan menyalurkan aspirasi/tuntutan yang disampaikan. Pada sore hari, sejumlah perwakilan mahasiswa merangsek masuk ke ruang sidang utama dan mulai melakukan aksi aksi pengrusakan terhadap fasilitas yang ada di dalam gedung. Aksi menjadi anarkis dan tak terkendali dan sejumlah oknum mahasiswa melakukan pengrusakan yang menyebabkan hampir semua prasarana di ruang sidang utama mengalami kerusakan berat. Kerugian yang ditaksir mencapai 1 milyar rupiah. Aparat keamanan berhasil membubarkan paksa aksi mahasiswa menjelang malam hari.

- Pertemuan Jajaran Forkopimda Sumbar Pascaanarkisme Di Gedung DPRD Prov. Sumbar.

Pascaanarkisme yang terjadi di gedung DPRD Prov. Sumbar saat berlangsung aksi unjuk rasa mahasiswa, pada tanggal 26 September 2019, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar memfasilitasi pertemuan antara jajaran Forkopimda Sumbar yang membahas tindak lanjut aksi mahasiswa dan peningkatan kewaspadaan dan keamanan pada hari-hari berikutnya, terutama menjelang pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI tanggal 19 Oktober 2019. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar dan dihadiri oleh :

- Kapolda Sumbar
- Danrem 032/Wirabraja
- Danlantamal II Padang
- Danlanud Sutan Sjahrir
- Wakil Kajati Sumbar
- Kepala BIN Daerah Sumbar
- Badan Kesbangpol Prov. Sumbar

Dalam pertemuan tersebut dibahas adanya kemungkinan aksi mahasiswa ditanggapi oleh kelompok yang ingin mengacaukan stabilitas keamanan di daerah, terutama jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.

f) Pemantauan aktivitas PT. DEMPO Sumber Energy di kabupaten Pesisir Selatan

Masyarakat nagari Pelangai Gadang kecamatan Ranah Pesisir melaporkan aktivitas PT. DEMPO Sumber Energy yang sedang melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLMTH) di nagari Pelangai Gadang, kecamatan Ranah Pesisir. Masyarakat menduga PT. DEMPO melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin, yakni melakukan penambangan batu/bahan galian lainnya di sungai Pelangai Gadang.

Menanggapi isu tersebut, pemkab Pesisir Selatan dan Pemprov Sumbar sudah melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan PLMTH oleh PT. DEMPO di kecamatan Ranah Pesisir. Bupati Pesisir Selatan bersama jajaran Forkopimda juga sudah melakukan peninjauan langsung bersama tokoh pemuda dan nagari setempat. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Bupati Pesisir Selatan menyatakan sejauh ini aktivitas PT. DEMPO sesuai dengan ijinnya.

b. Outcomes

Terjalannya koordinasi dengan dinas instansi terkait dalam penanganan masalah strategis daerah

c. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas antar anggota Komite Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait lainnya dalam penanganan permasalahan guna mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- Solusi
Perlu lebih lanjut mengintensifkan pertemuan dan koordinasi dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan mencari solusi dan pemecahan permasalahan yang lebih optimal.

2. Pengawasan Orang Asing

a. Output

Output dari kegiatan ini berupa terlaksananya 3 kali rapat tim pengawasan orang asing, tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Pemantauan Orang Asing serta terlaksananya koordinasi dengan Non-Governmental Organizations (NGO) dan instansi terkait dalam pemantauan orang asing di 19 kabupaten/kota di Sumbar.

Ruang lingkup pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing yaitu diplomat/tamu VIP asing, tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing, wartawan dan shooting film asing, peneliti asing, artis asing, rohaniwan asing dan ormas asing. Terkait dengan hasil pengawasan aktivitas orang asing di lapangan, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat melaksanakan beberapa kali rapat tim Pengawasan Orang Asing (POA), dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rapat Pengawasan Orang Asing tanggal 11 September 2019

Rapat dilaksanakan untuk membicarakan isu-isu aktual terkait keberadaan orang asing di Sumbar dan menghimpun masukan untuk rencana penyusunan Ranpergub Pemantauan Orang Asing. Peserta rapat terdiri dari Kasintel Kejati Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan Sumbar, Perwakilan dari Kantor Imigrasi Padang, Perwakilan dari Lanud Sutan Syahrir, Perwakilan dari Lantamal II Padang, Kasintel Korem 032, Dantim BAIS TNI, Perwakilan dari Dispora Sumbar, Perwakilan dari

DPM & PTSP Sumbar, Perwakilan dari Polda Sumbar dan Perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar. Adapun hasil diskusi dari pelaksanaan rapat adalah sebagai berikut :

1. Arahan Kepala Badan Kesbangpol :

- a. Tim POA Sumbar merencanakan pelaksanaan operasi gabungan bersama tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Prov. Sumbar ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk mengetahui aktivitas dan keberadaan orang asing di daerah itu.
- b. Perlu dibangun persepsi yang sama antar anggota tim POA dan tim PORA untuk mencapai kolaborasi dan sinergitas yang baik saat melakukan operasi.
- c. Pertemuan juga dalam rangka menghimpun masukan/saran untuk rencana penyusunan Ranpergub POA.

2. Tanggapan Peserta Rapat

1. Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham

- Agak sulit melakukan pendataan dan pemantauan aktivitas orang asing di Mentawai. Kemenkumham baru dapat mengetahui aktivitasnya tersebut saat ada orang asing yang melakukan perpanjangan KITAS.
- Perlu dilakukan terlebih dahulu *mapping area* serta penentuan objek maupun sifat dari operasi gabungan yang akan dilakukan sebelum berangkat ke Mentawai.
- Pemprov Sumbar perlu mengantisipasi efek bumerang jika dilakukan operasi terhadap aktivitas orang asing secara terbuka, karena dikhawatirkan akan memunculkan berita-berita yang tidak benar dan mendadak viral di masyarakat. Operasi yang dilakukan terhadap orang asing sebaiknya dalam bentuk *silent operation*.
- Bagi orang asing yang tidak mendatangkan manfaat bagi daerah/masyarakat dan pendatang ilegal, biasanya diambil dua tindakan yakni projustisia dan deportasi.
- Untuk penyusunan Ranpergub POA, Pemprov Sumbar dapat berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk dilakukan harmonisasi agar konten Ranpergub nantinya tidak menyalahi aturan yang ada di atasnya.

2. BAIS TNI

- Tim POA sebaiknya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Nakertans, Dinas Dukcapil dan Dinas Pariwisata untuk memperoleh data-data lengkap tentang orang asing yang ada di Mentawai, sehingga memudahkan pelaksanaan pengecekan aktivitas orang asing dengan perijinan yang dimilikinya
- Data-data orang asing yang dipegang oleh instansi/pemerintah daerah hendaknya terperinci dan lengkap.
- Untuk penyusunan Ranpergub POA, ada baiknya juga mencari referensi dari peraturan-peraturan Nagari yang ada di Sumbar, sehingga nanti Ranpergub juga memuat kearifan lokal, sehingga orang asing yang datang ke Sumbar dapat menyesuaikan diri dengan kultur/kebiasaan lokal.

3. BNN Provinsi Sumbar

- Orang asing termasuk yang ada di Kep. Mentawai ada yang terindikasi menggunakan zat terlarang jenis mariyuana atau lainnya.
- Jika memungkinkan, dalam operasi gabungan akan dilakukan juga pengecekan terhadap orang-orang asing apakah mereka merupakan pemakai, sehingga bisa dikembangkan untuk mengetahui sejauhmana peredarannya di Sumbar

4. BIN Daerah Sumbar

- Intelijen di Mentawai tidak dapat melakukan pemantauan terhadap orang asing secara leluasa karena ada beberapa kebijakan yang merupakan domain kantor imigrasi.
- Terkait kedatangan orang asing, disatu sisi mereka merupakan wisatawan yang mendatangkan keuntungan bagi daerah namun di sisi lain kita juga perlu berhati-hati agar orang asing tidak leluasa di daerah ini

2. Pelaksanaan Rapat Pengawasan Orang Asing tanggal 11 September 2019

Rapat dilaksanakan untuk membahas keberadaan orang asing di Sumatera Barat khususnya perkembangan tenaga kerja asing yang bekerja pada PT. Dempo Sumber Energy di Balai Selasa, Kecamatan Ranah Pesisir, Pesisir Selatan. Adapun tanggapan/diskusi yang berkembang dalam rapat adalah sebagai berikut :

1. Arahan Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar

- Kepada perwakilan PT. Dempo agar memberikan informasi dan klarifikasi tentang keberadaan orang asing pada perusahaan tersebut.
- Saat ini baru dibangun tapak turbin pada pembangkit listrik di Balai Selasa, Ranah Pesisir, Pesisir Selatan.
- PT Dempo agar mengkonfirmasi apakah TKA telah melapor ke Kementerian atau ke pemerintah daerah.
- PT. Dempo agar memberikan laporan secara berkala ke pemerintah daerah serta memberikan informasi/melakukan pendekatan kepada masyarakat tentang aktivitas yang mereka lakukan.
- Dipastikan agar tidak ada dampak lingkungan tertentu dengan adanya pembangunan pembangkit listrik ini.

2. Tanggapan Peserta Rapat

1. Asintel Lantamal

- Pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sebaiknya telah membuat tembusan pada pemerintah kabupaten/kota hingga level terbawah sehingga apabila ada isu di bawah maka pemerintah kabupaten telah mempunyai jawabannya secara legal pada masyarakat.
- Sosialisasi/pendekatan dapat dilakukan juga dengan metode publikasi misal menggunakan media komunikasi seperti radio, dll untuk menghindari miskomunikasi dan misinformasi kedepannya.

2. Divisi Keimigrasian Kemenkum dan HAM

- Mengenai data yang diberikan dari PT Dempo terkait keberadaan TKA di PT. Dempo sekitar 36 orang.
- Dari sejak proyek dimulai, ditengarai jumlah TKA yang bekerja makin lama makin banyak seiring perkembangan proyek.
- Azas mempekerjakan orang asing di Indonesia adalah hanya orang asing dengan keahlian tertentu/yang memang memiliki manfaat.
- PT. Dempo agar kooperatif terhadap pemerintah daerah karena proyek itu akan bermanfaat untuk rakyat.
- Orang asing agar mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah tentu mengedepankan upaya upaya preventif dan menghindari hal hal represif terhadap permasalahan seperti ini.

3. DPM PTSP

- Persoalan ini hanya masalah miskomunikasi karena PT. Dempo telah mengantongi ijin dan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- PT. Dempo agar membuka diri dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah setempat juga kepada masyarakat.
- Sebaiknya sosialisasi/pendekatan formal juga dilakukan oleh PT. Dempo dengan melibatkan pemerintah daerah setempat (nagari/kecamatan/kabupaten).

4. Direktorat Intelkam Polda

- Ada skala investigasi yang dilakukan polisi dan Polda Sumbar telah beberapa kali berkunjung ke lokasi. Dari hasil investigasi, salah satu pemicu persoalan adalah tidak adanya sosialisasi/pendekatan dari PT. Dempo maupun unsur pemerintah daerah ke masyarakat setempat.
- Dari hasil pengamatan, para TKA ditempatkan di rumah rumah kos, mungkin disebabkan oleh belum selesainya *camp camp* pekerja yang dibangun PT. Dempo sehingga menimbulkan tanda tanya ditengah masyarakat kenapa orang asing terlihat di desa mereka.
- Di sisi lain, masyarakat juga berterima kasih karena kini mereka dapat memanfaatkan akses jalan yang dibuka karena ada proyek ini.
- Bagaimana kondisi TKA disana apakah benar sudah kembali jelang pemilu

5. Intel Kejati

- PT Dempo agar memasang semacam plang pemberitahuan yang menginformasikan data TKA yang bekerja diproyek tersebut sehingga tidak muncul pertanyaan lain dari masyarakat

6. BIN Daerah Sumbar

- Hendaknya dibangun komunikasi dua arah antara PT. Dempo dengan pemerintah dan masyarakat.
- PT. Dempo hendaknya juga memahami kearifan lokal karena masyarakat Minang memang ciri khasnya menginginkan informasi yang jelas.

- Para TKA agar mampu menjaga kondusivitas di daerah setempat.

7. Intel BNN Provinsi Sumbar

Keppres Nomor 6 Tahun 2018 tentang RAN P4GN, agar pemerintah daerah aktif melakukan langkah langkah P4GN. PT. Dempo sebaiknya juga melakukan langkah langkah preventif pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap tenaga kerjanya.

8. Bagian Kesbangpol Pesisir Selatan

Masyarakat tidak tahu mekanisme pembangunan turbin sehingga PT. Dempo perlu memberikan informasi yang jelas berupa sosialisasi pada wali nagari sehingga wali nagari dapat meneruskan pada masyarakat.

9. Kanwil Kementerian Agama

Perlu diantisipasi isu agama dan TKA perlu melakukan klarifikasi apa agamanya, serta jika ingin melakukan ritual ibadah maka agar memperhatikan tata caranya sehingga tidak menimbulkan isu lainnya ditengah masyarakat

10. Tanggapan PT. Dempo Sumber Energy (Rudi Wijaya – Koordinator Khusus Orang Asing)

- Mengenai ijin kerja telah dimiliki untuk periode 6 bulan – 1 tahun.
- Sistem Pembangkit Listrik yang digunakan menggunakan sistem tangki yang tidak ada kontraktor Indonesia yang berani membangunnya, sehingga menggunakan yang dimiliki China.
- Dempo juga telah mengantongi perjanjian jual beli listrik dari PLN termasuk analisa AMDAL juga telah dkantongi
- Mengenai TKA, tidak semua ada disini namun koordinatornya beberapa ada di China dan sesekali memang berkunjung ke proyek disini. Kurang lebih 17 orang bekerja di Indonesia dan sisanya 15 di luar negeri.
- Isu *local people* tidak boleh masuk ke lokasi itu bohong dan PT Dempo sangat *welcome* pada pemerintah daerah. Kedepannya PT Dempo akan membangun portal untuk mengatur lalu lintas keluar masuk ke proyek.
- Untuk proyek, PT. Dempo memakai kontraktor lokal, kerjasama dengan perusahaan lokal.
- PT. Dempo telah melaporkan keberadaan ke Kementerian dan ke pemerintah provinsi. PT Dempo juga rutin bertemu dengan wali nagari setempat untuk berkomunikasi.
- PT. Dempo memiliki humas dan akan melakukan sosialisasi serta pendekatan kepada masyarakat meski tak dipungkiri pro kontra akan tetap ada.
- PLN dan PT. Dempo telah memiliki perjanjian apabila dalam 2 tahun belum selesai maka akan ada semacam *warning letter* kepada PT. Dempo
- Pada tanggal 16 - 18 April 2019, TKA akan diliburkan dulu, dan apabila kondisi kondusif maka TKA akan kembali bekerja pada tanggal 19 April 2019

- Pemerintah China menerapkan cek kesehatan (*mind and body check*) kepada tenaga kerjanya yang akan diberangkatkan ke luar negeri termasuk tes narkoba

3. Pelaksanaan Rapat Pengawasan Orang Asing tanggal 16 Oktober 2019

Rapat dilaksanakan untuk membicarakan isu-isu aktual terkait keberadaan orang asing di Sumbar. Adapun hasil dari pelaksanaan rapat adalah sebagai berikut :

- Keberadaan orang asing dan aktivitas kapal kapal asing di Kepulauan Mentawai selalu berada dalam pemantauan tim intel dari Lantamal II Teluk Bayur.
- Hingga saat ini, situasi dan kondisi keamanan di Mentawai yang terkait dengan keberadaan orang asing masih relatif stabil.
- LLDIKTI sangat mengapresiasi forum forum seperti ini dan mengharapkan sinergitas antara lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah khususnya kesbangpol. Hal ini akan memudahkan koordinasi antar lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah karena tak menutup kemungkinan pelajar pelajar asing akan masuk ke universitas universitas di Sumbar.
- Diharapkan tim Pemantauan Orang Asing (POA) maupun tim Pengawasan Orang Asing (PORA) dapat lebih pro aktif dalam melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan
- Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing terkait masalah perikanan, maka hal tersebut merupakan cakupan pekerjaan dari DKP Prov. Sumbar.
- Disnaker Prov. Sumbar menginginkan kerjasama dengan instansi instansi terkait pemantauan orang asing.

Adapun sejumlah persoalan terkait keberadaan dan aktivitas orang asing di Sumbar yang cukup menonjol berdasarkan hasil monitoring ke lapangan dari tim pemantauan orang asing adalah sebagai berikut :

- a) Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan perusahaan di sejumlah kabupaten/kota di Sumbar.
Pada bulan Juli – September 2019, tim Pemantauan Orang Asing (POA) bekerjasama dengan tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Provinsi Sumbar melakukan pemantauan ke sejumlah kabupaten/kota. Selain melakukan pemantauan rutin, pemantauan kali ini juga dilakukan dalam rangka menanggapi laporan dari masyarakat mengenai aktivitas Tenaga Kerja Asing (TKA) yang banyak ditemui di sejumlah perusahaan lokal di beberapa kabupaten/kota. Berdasarkan laporan yang diterima, tim melakukan pengecekan langsung data data dan dokumen milik para TKA tersebut dan sejauh ini tidak ditemukan pelanggaran administratif oleh TKA. Tim juga menyarankan pada perusahaan yang mempekerjakan TKA agar melakukan sosialisasi dan pendekatan pada masyarakat lokal untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan.
- b) Adanya 44 kapal pesiar yang berlayar di laut wilayah Sumatera Barat, yang terindikasi dimiliki oleh orang asing.
Persoalan 44 kapal pesiar ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang melihat puluhan kapal berlayar di wilayah barat laut Sumbar, berkemungkinan menuju ke Kep. Mentawai atau Pesisir Selatan. Masyarakat/nelayan lokal melihat penumpang kapal didominasi oleh orang asing. Berdasarkan koordinasi dan pemantauan yang dilakukan, tim POA Prov. Sumbar menemukan bahwa kapal kapal ini kebanyakan berbendera Indonesia namun belum seluruhnya data pemilik kapal

diperoleh. Hingga saat ini, pemerintah provinsi Sumbar masih melakukan koordinasi dengan Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Sumbar serta Kantor Imigrasi Sumbar.

b. Outcomes

Meningkatnya koordinasi dalam pemantauan orang asing di daerah

c. Permasalahan dan Solusi

• Permasalahan

Belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas antar instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Sumatera Barat dalam menjawab permasalahan terkait aktivitas orang asing di Provinsi Sumatera Barat.

• Solusi

Perlu memaksimalkan fungsi satgas dalam wadah intelijen yang dapat melakukan monitoring dan penindakan dilapangan terhadap aktivitas dan prosedur administrasi orang asing yang melanggar aturan yang berlaku atau indikasi-indikasi/misi tertentu orang asing yang masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Barat.

3. Penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial

a. Output

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya 5 kali rapat tim terpadu penanganan konflik sosial dan 1 kali rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial serta tersusunnya rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial.

Dalam rangka penanganan konflik sosial di Sumatera Barat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat 427-244-2019 tanggal tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial ini bertujuan untuk mengefektifkan keterpaduan dan koordinasi antar aparatur pemerintah daerah dengan instansi vertikal terkait di daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Pencegahan konflik; (2) Penghentian konflik; (3) Pemulihan pascakonflik.

Tim terpadu penanganan konflik sosial memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Aksi (RA) Terpadu Penanganan Konflik Sosial setiap tahunnya. Pelaporan terhadap target target penanganan konflik dalam RA dilakukan setiap empat bulan berdasarkan periodisasi B04 (rentang waktu Januari s/d April), B08 (rentang waktu Mei s/d Agustus) dan B12 (rentang waktu September – Desember), yang dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rapat tim terpadu Penanganan Konflik Sosial

Hasil rapat tim terpadu penanganan konflik sosial yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Evaluasi Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat Tanggal 26 Maret 2019.

Penyelenggaraan rapat ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan mencapai sinergitas jajaran kesbangpol provinsi dan

kabupaten/kota dalam penyusunan dan pelaporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial. Secara teknis, rapat evaluasi ini membahas mekanisme penyusunan RA bagi kabupaten/kota terutama bagi yang belum menyusun RA, dan memperkenalkan aplikasi SITIMDU yang merupakan sistem informasi pelaporan penanganan konflik sosial bagi kabupaten/kota, yang dibangun oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar. Rapat juga membahas teknis penginputan data dukung pelaporan penanganan konflik sosial.

Adapun poin-poin penting yang dirangkum dan dihasilkan dalam rapat adalah sebagai berikut :

- Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas menyusun RA terpadu penanganan konflik sosial di daerah setiap tahun. Untuk provinsi, minimal mesti menyusun 15 RA dan untuk kabupaten/kota minimal menyusun 10 RA.
- Komponen RA mencakup kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya konflik/mencegah eskalasi potensi konflik, upaya-upaya yang dilakukan untuk menghentikan konflik yang terjadi, dan mencakup upaya-upaya yang dilakukan untuk memulihkan konflik termasuk tentang penanganan kejadian bencana.
- Daerah yang telah menyusun RA hingga akhir Maret 2019 terdiri dari 7 kabupaten/kota yaitu, kota Padang, kota Solok, kota Payakumbuh, Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Agam dan kab. Pasaman.
- Badan Kesbangpol Prov. Sumbar terus melakukan asistensi dan konsultasi terutama terhadap kabupaten/kota yang belum menyusun RA, agar dapat segera menyusun dan melaporkan RA terpadu penanganan konflik sosial kabupaten/kota pada pemerintah provinsi.
- Untuk optimalisasi penggunaan aplikasi SITIMDU, tiap-tiap kabupaten/kota akan diberikan akun untuk melakukan *upload* data dukung kegiatan-kegiatan penanganan konflik sosial.
- Dengan berjalannya pelaporan melalui aplikasi SITIMDU tersebut, diharapkan pelaporan penanganan konflik sosial dari kabupaten/kota dapat berjalan efektif dan optimal.

2. Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B 04 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Periode B-04 Tanggal 3 Mei 2019.

Rapat ini dilaksanakan untuk membahas mekanisme pelaporan rencana aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Prov. Sumbar Periode B 04 (Januari – April 2019) dan optimalisasi penyiapan data dukung rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial prov. Sumbar.

Poin-poin penting yang disampaikan dalam rapat antara lain :

- Masing-masing OPD dan instansi vertikal melaporkan penanganan konflik sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya, mencakup pencegahan, penghentian dan pemulihan pascakonflik.
- Adapun beberapa kegiatan penanganan konflik sosial yang dilakukan oleh OPD/instansi vertikal di provinsi Sumbar pada periode B 04 diantaranya :
 - a. Untuk instansi pengamanan seperti Polda Sumbar maupun Korem 032/Wirabraja umumnya fokus penanganan ada di kategori penghentian konflik, melakukan pembinaan dan berkoordinasi dengan Polres dan Kodim di kabupaten/kota.
 - b. Untuk mencegah peristiwa konflik di bidang keagamaan, pada awal tahun 2019, Kanwil Kementerian Agama Wilayah Sumbar telah melakukan dialog lintas agama di kabupaten/kota yang melibatkan ormas setempat, dan mengadakan dialog kerukunan beragama bagi pelajar. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan harapan dapat disebarluaskan oleh peserta kegiatan sehingga menimbulkan suasana beragama yang tentram di daerah.
 - c. Untuk mencegah timbulnya konflik di bidang kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov Sumbar fokus

pada upaya pemulihan pascabencana, mencakup penanganan pengungsi dan penyaluran bantuan.

- d. Untuk penanganan konflik sosial, saat ini Dinas Perhubungan Prov. Sumbar fokus pada proses reaktivasi jalur kereta api Padang – Pulau Air. Jalur ini rencananya akan diaktifkan pada bulan Januari 2020 dan berpotensi konflik relative tinggi. Di jalur reaktivasi tersebut, terdapat sekitar 200 KK yang harus disterilkan, termasuk di wilayah Terendam, kota Padang. Untuk meminimalkan potensi konflik, Dinas Perhubungan Prov. Sumbar akan mengadakan pendekatan pada masyarakat. Sedangkan untuk eksekusi, akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan RI.
- Masing masing OPD/instansi vertikal akan memaksimalkan pengiriman data dukung pelaporan terpadu penanganan konflik sosial periode B 04, yang dikoordinir oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dan dilaporkan pada bulan Mei 2019 ke Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode Provinsi Sumatera Barat Periode B-08 Tanggal 22 Agustus 2019.

Rapat dilaksanakan untuk membahas mekanisme pelaporan rencana aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Prov. Sumbar Periode B 08 (Mei - Agustus 2019) dan optimalisasi penyediaan data dukung rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial prov. Sumbar.

Poin poin penting yang disampaikan dalam rapat antara lain :

- Kegiatan kegiatan penanganan konflik sosial yang dilakukan oleh OPD/instansi vertikal di wilayah Sumbar pada rentang waktu Mei – Agustus 2019 diantaranya :
- a. Dalam rangka pengenalan penegakan hukum pada masyarakat dan pelajar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar melaksanakan sejumlah dialog dan interaksi langsung di dengan masyarakat di kabupaten/kota, dalam bentuk kegiatan Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa.
 - b. Di bidang kebencanaan, untuk rentang waktu Mei – Agustus 2019, BPBD Prov. Sumbar melaporkan tidak ada kejadian bencana yang mencapai skala penanganan oleh provinsi. Beberapa kejadian bencana yang terjadi masih merupakan skala kabupaten/kota, yang terus dimonitor oleh provinsi.
 - c. Polda Sumbar menyatakan bahwa untuk situasi kamtibmas di Sumbar saat ini relatif kondusif. Meski terdapat sejumlah riak dalam kehidupan bermasyarakat, namun masih dapat dikendalikan.
 - d. Lantamal II Padang melaporkan bahwa saat ini fokus kegiatan adalah melakukan pemantauan wilayah perairan yang menjadi cakupannya. Hingga saat ini situasi dan kondisi perairan relatif kondusif.
- Adapun potensi konflik di provinsi Sumbar yang masih dalam penanganan saat ini diantaranya :
- a. Pemasangan bagan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Singkarak menimbulkan potensi konflik bagi masyarakat di sekitar Danau Singkarak. Masyarakat menilai bahwa mata jaring yang digunakan berukuran sangat kecil sehingga membuat seluruh ikan bilih terangkut saat dijaring. Hal ini dapat menyebabkan punahnya ekosistem ikan bilih di danau tersebut. Untuk mencegah potensi konflik lanjutan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Prov. Sumbar bersama Lantamal II Padang melakukan operasi perairan secara berkala yang juga melibatkan Polairud. DKP mengharapkan

segera diterbitkan Perda Prov. Sumbar yang mengatur tentang penertiban bagan dan KJA di Danau Singkarak.

- b. Rencana reaktivasi jalur kereta api Padang – Pulau Air dan Padang – Bukittinggi masih berpotensi mengalami penolakan dari masyarakat karena diatas tanah yang akan dilalui rel tersebut berdiri beberapa bangunan masyarakat (rumah/ruko)
 - c. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi Riau dan Jambi turut berdampak pada kualitas udara di beberapa kabupaten/kota di Sumbar. BPBD Prov. Sumbar bersama instansi terkait lainnya masih terus memonitor dampak kabut asap kiriman ini.
- Penyerahan pelaporan penanganan konflik sosial periode B 08 disepakati tanggal 28 Agustus 2019, yang dikoordinir oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dan akan diserahkan pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

4. Rapat Koordinasi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Bagi Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat tanggal 9 Desember 2019.

Rapat dilaksanakan untuk membahas penyusunan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial kabupaten/kota tahun 2020, Pembahasan potensi konflik tahun 2019 dan potensi kerawanan Pilkada 2020, dan Pembahasan pemanfaatan Sistem Informasi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (SITIMDU) Kabupaten/Kota Tahun 2020.

Poin poin penting yang dibahas dalam rapat adalah :

- Berdasarkan surat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Nomor 300/7753/Polpum tentang penyusunan Rencana Aksi Terpadu, masing masing kabupaten/kota menyusun minimal 10 rencana aksi penanganan konflik sosial.
- Penyusunan rencana aksi tersebut didasarkan pada hasil pemetaan potensi dan peristiwa konflik di daerah yang bersifat strategis, mencakup upaya pencegahan, penghentian dan pemulihan pascakonflik.
- Penyusunan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun 2020 juga memperhitungkan potensi kerawanan Pilkada tahun 2020, penanganan paham radikal, pemulihan pascakonflik terkait perlindungan perempuan dan anak.
- Terkait penerapan aplikasi SITIMDU bagi kabupaten/kota, akan dilakukan pada awal tahun 2020. Pada prosesnya, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar menghimpun rencana aksi kabupaten/kota, dan melakukan penginputan rencana aksi tersebut pada aplikasi SITIMDU. Masing masing kabupaten/kota akan menugaskan seorang operator pelaksana yang akan menginput data dukung kegiatan penanganan konflik sosial di daerah.

5. Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat Periode B-12 Tanggal 10 Desember 2019.

Rapat dilaksanakan untuk membahas pelaporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial periode B 12 (September – Desember 2019), penyusunan rencana aksi terpadu tahun 2020, dan pembahasan potensi konflik tahun 2019 dan potensi kerawanan pemilukada tahun 2020.

Adapun poin poin penting yang dibahas diantaranya :

- Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan periode B 08, terdapat 4 rencana aksi yang capaiannya belum maksimal yaitu :
 1. RA 04 : Peningkatan kesedaran hukum masyarakat. Penanggung jawab -> Kanwil Hukum dan HAM Sumbar, Kejati Sumbar.
 2. RA 07 : Peningkatan wawasan/pengetahuan politik masyarakat. Penanggungjawab -> KPU, Badan Kesbangpol, Diskominfo

3. RA 08 : Sosialisasi peraturan perundang undangan ketenagakerjaan dan pengawasan peraturan ketenagakerjaan. Penanggungjawab -> Disnakertrans, DPM dan PTSP, Disperindag
 4. RA 10 : Pengoptimalan kegiatan pencegahan aksi radikalisme/terorisme. Penanggungjawab -> Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Badan Kesbangpol, Polda Sumbar, BIN Daerah Sumbar, Diskominfo.
- Diharapkan terjalin konsolidasi yang baik antar anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Prov. Sumbar untuk mengoptimalkan capaian pelaporan B 12, juga untuk efektivitas koordinasi penyelesaian potensi konflik yang terjadi di tahun 2019 dan diprediksi masih akan berlanjut di tahun 2020.
 - Potensi konflik yang diprediksi masih akan berlanjut tahun 2020 diantaranya :
 - a. Situasi dan kondisi di sekitar Danau Singkarak pascaeksekusi bagan dan KJA di kabupaten Solok.
 - b. Persoalan tanah ulayat pada pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru pada ruas jalan di kabupaten Padang Pariaman.

Rapat koordinasi (rakor) terpadu penanganan konflik sosial

Hasil rapat koordinasi terpadu penanganan konflik sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 5 – 6 Agustus 2019 di Balai Sidang Bung Hatta, Bukittinggi, dan diikuti oleh 85 orang peserta yang terdiri dari anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Prov. Sumbar dan dari kesbangpol kabupaten/kota. Rapat ini bertujuan guna mengoptimalkan penyusunan rencana aksi tahunan dan pelaporan penanganan konflik sosial provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota, serta untuk memberikan pengenalan dan pemahaman terhadap mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi penanganan konflik sosial termasuk pemanfaatan sistem informasi pelaporan bagi kabupaten/kota.
2. Adapun materi yang dibahas dalam rapat koordinasi ini yaitu :
 - Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Konflik Sosial
 - Mekanisme Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial
 - Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Dalam Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik di Kabupaten/Kota
3. Poin poin penting yang dibahas dalam rapat koordinasi ini yaitu :
 - Bertitik tolak dari evaluasi capaian pelaporan penanganan konflik sosial provinsi Sumatera Barat periode B 04 (Januari – Maret 2019), terdapat sejumlah kendala sehingga pelaporan per rencana aksi belum maksimal.
 - Untuk periode pelaporan B 08 (Mei – Agustus 2019) dan B 12 (September – Desember 2019), masing masing anggota tim terpadu dapat memaksimalkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, melakukan kegiatan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai target yang ditetapkan, serta menyiapkan data dukung kegiatan dengan lengkap sehingga pencapaian target rencana aksi dalam pelaporan penanganan konflik sosial pada periode periode berikutnya akan lebih maksimal.
 - Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, diharapkan masing masing kabupaten/kota dapat membentuk dan mengoptimalkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota, menyusun rencana aksi daerah tahun 2020, dan memaksimalkan fungsi dan mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang terhadap target keberhasilan rencana aksi penanganan konflik sosial.

Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Provinsi Sumatera Barat di tahun 2019 memiliki 17 Rencana Aksi yaitu :

1. Peningkatan Nilai-nilai bela negara dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 01);
2. Pemantapan Nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 02);
3. Peningkatan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa dalam rangka revolusi mental pelajar sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 03);
4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (RA: 04) leading sektor Kejati Sumbar;
5. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (RA: 05) leading sektor Kanwilkemenkumham Sumbar;
6. Peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 06);
7. Percepatan Penetapan Batas Daerah Administrasi Provinsi dan Kab/Kota (RA: 07);
8. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan. (RA: 08);
9. Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan. (RA: 09);
10. Pengoptimalan kegiatan pencegahan aksi terorisme (RA: 10);
11. Penghentian Konflik Sosial menonjol didaerah/provinsi dan terorisme (RA: 11);
12. Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang Lahan/SDA, periode mulai tahun 2017 (RA:12);
13. Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang Lahan/SDA, periode mulai tahun 2018 (RA:13);
14. Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang ekonomi/industrial periode mulai tahun 2018 (RA:14);
15. Pelaksanaan Pemulihan Pasca Konflik / Bencana Sosial (RA:15)
16. Terlaksananya Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2018 (RA: 16);
17. Pelaporan Kasus Konflik Sosial setiap bulannya (RA: 17)

Adapun hasil Evaluasi Pelaporan Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Evaluasi Pelaporan Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat Periode B 04 (Januari – Maret).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan penanganan konflik sosial provinsi Sumatera Barat ke Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dari 17 RA yang ditargetkan, untuk periode B 04, persentase capaian pelaksanaan target adalah sebesar 79,71% dengan keterangan sebagai berikut :

- a. 3 RA tidak memenuhi target (merah) yaitu : RA 4, RA, 13 dan RA 14
- b. 3 RA mendekati target (kuning) yaitu : RA 8, RA 10, dan RA 12
- c. 7 RA sesuai target (hijau) yaitu : RA 2, RA 5, RA 6, RA 11, RA 15, RA 16 dan RA 17
- d. 4 RA melebihi target (biru) yaitu : RA 1, RA 3, RA 7 dan RA 9.

Berdasarkan hasil capaian pelaporan penanganan konflik sosial tersebut, untuk periode B 04, Sumatera Barat meraih peringkat ke-7 wilayah Sumatera – Jawa. Jika dibandingkan dengan persentase capaian target RA periode B 04 tahun 2018, Sumatera Barat berada pada peringkat 8 wilayah Sumatera – Jawa.

- **Evaluasi Pelaporan Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat Periode B 08 (Mei – Agustus).**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan penanganan konflik sosial provinsi Sumatera Barat ke Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dari 17 RA yang ditargetkan, untuk periode B 08, persentase capaian pelaksanaan target adalah sebesar 90,00% dengan keterangan sebagai berikut :

- a. 1 RA tidak memenuhi target (merah) yaitu : RA 7
- b. 2 RA mendekati target (kuning) yaitu : RA 8, RA 10
- c. 10 RA sesuai target (hijau) yaitu : RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 9, RA 12, RA 13, RA 14, RA 15 dan RA 17.
- d. 4 RA melebihi target (biru) yaitu : RA 5, RA 6, RA 11, RA 16.

Berdasarkan hasil capaian pelaporan penanganan konflik sosial tersebut, untuk periode B 08, Sumatera Barat meraih peringkat ke-5 wilayah Sumatera – Jawa. Jika dibandingkan dengan persentase capaian target RA periode B 04 tahun 2019, Sumatera Barat naik dua peringkat dari peringkat 7 menjadi peringkat 5 untuk wilayah Sumatera - Jawa.

- **Persiapan Pelaporan Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat Periode B 12 (September – Desember).**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan penanganan konflik sosial provinsi Sumatera Barat periode B 04 dan B 08, dari 17 RA ditargetkan terlaksana diatas 90%. Untuk mengoptimalkan persentase capaian target, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat fokus pada capaian target RA periode B 08 yang masih tidak memenuhi target dan yang mendekati target.

Persiapan pelaporan B12 hingga akhir Desember 2019, masing-masing OPD/instansi penanggungjawab masih dalam proses pengumpulan dan penyusunan data dukung pada setiap rencana aksi yang ada. Adapun penginputan pelaporan penanganan konflik sosial periode September – Desember 2019 akan dilakukan pada awal bulan Januari 2020.

b. Outcomes

Tersusunnya rencana aksi penanganan konflik sosial

c. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - a. Terdapat beberapa instansi yang belum melaksanakan kegiatannya di periode pelaporan ini
 - b. Terdapat data dukung yang tidak tepat sasaran yang disampaikan oleh beberapa OPD/instansi
 - c. Jadwal pembukaan portal pelaporan yang terlalu pendek, berakibat upload pelaporan ke portal tidak berjalan maksimal.
 - d. Terdapat beberapa OPD/instansi yang mengalami pergeseran jadwal kegiatan, sehingga untuk pelaporan rencana aksi pada periode B08 menjadi nihil
 - e. Terjadinya pergeseran/mutasi personel penanggungjawab pelaporan rencana aksi pada beberapa instansi/OPD, sehingga tidak maksimalnya pelaporan RA terpadu penanganan konflik intansi/OPD tersebut.
- Solusi
 - a. Perlu peningkatan sinergitas terutama anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik yang berada pada level pengambil kebijakan, sehingga terdapat langkah-langkah strategis dalam meningkatkan nilai capain pelaporan rencana aksi tim terpadu dimaksud di tingkat nasional;
 - b. Perlu dilakukan Rakorda dan Rakornis yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan teknis penyusunan Rencana Aksi dan penyusunan data

dukung dan pelaporan rencana aksi bagi instansi/OPD yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat

4. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme

a. Output

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan potensi dan aksi terorisme di daerah.

Sebagai instansi pemerintah yang bertugas mendukung stabilitas keamanan di daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Terorisme pada tahun 2019. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk monitoring ke kabupaten/kota dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna memperoleh informasi terkait penyebaran paham radikal atau potensi aksi teror di kabupaten/kota.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara unsur-unsur elemen masyarakat di Provinsi Sumatera Barat untuk memperoleh kesamaan visi, misi dan persepsi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah tentang pencegahan penyebaran paham radikal dan potensi aksi terorisme di Sumatera Barat.

Adapun hasil pemantauan terhadap potensi aksi teror yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ke kabupaten/kota se-Sumbar adalah sebagai berikut :

a. Pemantauan kondisi keamanan di daerah pasca ditangkapnya terduga teroris di Padang.

Pada bulan Juli 2019, Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap seorang terduga teroris berinisial N alias AZ, yang diduga terlibat dengan kelompok JAD jaringan Sumatera dan Jawa. Terduga teroris di tangkap di daerah Perintis Kemerdekaan, Jati, kecamatan Padang Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui terduga teroris mengontrak rumah di daerah Berok, Nipah, kecamatan Padang Timur. Yang bersangkutan sudah lama dipantau oleh Densus 88, namun sejak bulan Agustus 2018, Densus 88 kehilangan jejaknya dan kasusnya kembali dikembangkan pada pertengahan 2019. Adapun hasil penyelidikan terhadap yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- Yang bersangkutan terkait dengan kelompok teror *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) pimpinan May Yusral bin Haji Umar bin Umar.
- Yang bersangkutan pernah mengikuti pelatihan teroris di Sumatera
- Yang bersangkutan telah melakukan pengamatan ke sejumlah pos polisi dan pusat keramaian di kota Padang untuk melakukan aksinya, namun tidak terealisasi.

Pasca ditangkapnya terduga teroris tersebut, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar melakukan monitoring ke beberapa kabupaten/kota guna memperoleh informasi terkait situasi dan kondisi keamanan. Monitoring juga dilakukan untuk mengetahui potensi penyebaran paham radikal di kabupaten/kota, dan berkoordinasi dengan unsur kewaspadaan di kabupaten/kota untuk mengetahui adanya ancaman terhadap stabilitas keamanan dan memperoleh informasi tentang data pendatang yang mencurigakan. Juga perlu diwaspadai adanya ancaman aksi baru dari rekan terduga teror yang ditangkap oleh aparat.

b. Pemantauan terhadap keluarga pelaku teror di kabupaten Sijunjung.

Pasca ditangkapnya pelaku teror berinisial R di pulau Jawa pada tahun 2016 lalu, pemerintah daerah masih terus melakukan pemantauan terhadap keluarga R yang hingga kini masih berdomisili di nagari Padang

Sibusuk, kabupaten Sijunjung. Pemantauan dilakukan oleh Pemkab Sijunjung dengan mengamati aktivitas yang dilakukan oleh istri, adik, dan teman dekat R. Hingga kini, aktivitas keluarga pelaku teror tersebut masih dalam taraf wajar. Pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan Pemkab Sijunjung dalam rangka kewaspadaan dini dan memonitor perkembangan yang terjadi. Pemerintah daerah juga telah melakukan sosialisasi deradikalisasi terhadap pemerintah nagari, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan kelompok kelompok pengajian di Sijunjung agar tidak mudah terpapar paham radikal.

c. Pemantauan situasi dan kondisi keamanan pasca ditangkapnya terduga teroris di kabupaten Tanah Datar.

Pada tanggal 20 Desember 2019, Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap 2 orang terduga teroris di jorong Diponegoro, nagari Baringin, kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Penangkapan ini di *back up* oleh Polres Tanah Datar. 1 orang terduga teroris berinisial TT ditangkap di rumah kontrakannya dan 1 orang lagi berinisial DR ditangkap di rumah orangtuanya di Simpang Asrama Baringin.

Pengeledahan rumah terduga teroris tersebut di *back up* oleh Polres Tanah Datar dan disaksikan oleh perangkat nagari Baringin dan unsur pemuda setempat. Dari hasil pengeledahan tersebut diamankan dua buah golok, satu bungkus paku, 1 buah laptop dan 1 buah buku berjudul "Seberapa Hebat Kamu Membelah Islam". Kedua terduga teroris dibawa oleh Densus 88 untuk pengembangan lebih lanjut.

Pasca penangkapan tersebut, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar bersama pihak terkait melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan di Tanah Datar dan beberapa kabupaten/kota lainnya. Pemantauan situasi dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memberi peringatan kepada warga agar tak mudah terpapar paham radikal. Warga juga dihimbau untuk melaporkan kepada aparat berwenang apabila menemukan pendatang didaerahnya yang berperilaku tertutup dan mencurigakan.

d. Pemantauan situasi dan kondisi keamanan di Sumatera Barat saat perayaan Natal dan Tahun Baru.

Berkaitan dengan kesiapan perayaan Natal dan Tahun Baru di Sumbar, perlu diwaspadai ancaman aksi teror oleh kelompok kelompok ekstrim khususnya di pusat-pusat keramaian dan di tempat ibadah (gereja). Berdasarkan koordinasi dengan unsur intelijen dan pengamanan daerah, pascaledakan bom di Polresta Medan pada bulan November lalu, perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan dan pengamanan di sejumlah titik vital di Sumbar, khususnya saat perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Peningkatan kewaspadaan dan keamanan juga perlu dilakukan di wilayah perbatasan antar provinsi.

e. Kewaspadaan Dini Terhadap Paham Radikal dan Potensi Aksi Teror di Sumatera Barat.

Pasca ditangkapnya beberapa orang terduga teroris di kota Padang dan di kabupaten Tanah Datar, pemerintah daerah dan aparat keamanan di wilayah Sumbar melakukan sejumlah langkah kewaspadaan dini. Meski hingga saat ini belum ada aksi teror yang terjadi di kabupaten/kota di Sumbar, dengan ditangkapnya beberapa terduga teroris di daerah ini, perlu diwaspadai adanya kemungkinan Sumbar dijadikan tempat pelarian dan persembunyian oleh pelaku/terduga teroris dari luar provinsi. Pemerintah provinsi Sumbar bersama sejumlah instansi vertikal dan unsur intelijen daerah aktif melakukan koordinasi, *sharing* informasi dan pemantauan secara berkala ke kabupaten/kota guna memperoleh informasi awal tentang potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan di Sumbar. Pemerintah provinsi Sumbar juga melakukan pendekatan pada

masyarakat berupa sosialisasi dan mendorong Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk selalu bersinergi dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat, untuk menghasilkan rekomendasi pengambilan kebijakan dalam menghadapi potensi ancaman keamanan sesuai dengan skalanya.

b. Outcome

Terwujudnya upaya pengawasan dan pencegahan terorisme di daerah

c. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
Belum maksimalnya upaya deteksi dan cegah dini terhadap paham radikalisme ditengah masyarakat.
- Solusi
Perlu adanya peningkatan kapasitas aparaturnya di Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Kasbangpol di tingkat Kabupaten/Kota baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga upaya deteksi dan cegah dini terhadap paparan radikalisme dapat segera dideteksi dan dilakukan upaya antisipatif secara cepat.

5. Kegiatan pengawasan dan pencegahan konflik sosial

a. Output

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya buku pemetaan potensi konflik Kabupaten/Kota di Sumbar.

Buku pemetaan potensi konflik mencakup gambaran potensi konflik per kabupaten/kota beserta analisis terhadap potensi dimaksud. Buku ini juga menggambarkan dominasi jenis potensi konflik di Sumbar serta rekapitulasi seluruh potensi konflik dalam satu tahun, yang bisa dijadikan pedoman pengelolaan potensi konflik di tahun mendatang.

Adapun hasil pemetaan potensi konflik di Sumatera Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik tahun 2019, terdapat 129 potensi konflik yang terdata di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Adapun klasifikasi potensi konflik berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :
 - a) Potensi konflik yang berlatar belakang SDA/Lahan sebanyak 51 potensi
 - b) Potensi konflik berlatar belakang ekopolsosbud sebanyak 38 potensi.
 - c) Potensi konflik berlatar belakang SARA sebanyak 9 potensi.
 - d) Potensi konflik berlatar belakang batas wilayah sebanyak 31 potensi
3. Dari 129 potensi konflik tersebut, terdapat sebanyak 15 potensi konflik menonjol yang masih dalam pemantauan pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota dan pihak terkait.
4. Dari 129 potensi konflik yang ada, terdapat 3 peristiwa konflik (anarkis) dengan keterangan sebagai berikut :
 - Bentrok antar warga nagari Sumpur dengan warga Bungo Tanjung terkait persoalan tapal batas nagari di Kabupaten Tanah Datar.
 - Perusakan tapal batas nagari Kapencong Lubuk Gambir (Kapelgam) dengan nagari Koto Baru oleh masyarakat nagari Kapelgam terkait perselisihan kepemilikan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Aksi pengrusakan kendaraan dinas oleh masyarakat nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan pada kegiatan operasi penertiban alat tangkap bagan dan keramba jaring apung di danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar.

b. Outcome

Terjalannya koordinasi dengan instansi terkait, tokoh agama tokoh masyarakat dan aparaturnya dalam pengawasan dan pencegahan konflik sosial

c. **Permasalahan dan Solusi**

- Permasalahan
Minimnya dukungan anggaran dalam pembentukan tim penyusunan pemetaan dan evaluasi pemetaan konflik di Sumatera Barat.
- Solusi
 - a. Peningkatan peran dan fungsi koordinasi lintas instansi dalam menyusun pemetaan potensi konflik di Sumatera Barat
 - b. Dukungan anggaran yang memadai dalam memaksimalkan penyusunan pemetaan serta evaluasi pemetaan potensi konflik di Sumatera barat.

6. **Kegiatan Forum Diskusi Pimpinan Daerah**

a. **Output**

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat dengan tim Forkopimda dan pemantauan terhadap isu-isu strategis di daerah. Rapat yang dilaksanakan pada tahun 2019 terkait dengan permasalahan kondisi terkini situasi dan kondisi keamanan Sumbar salah satunya masalah eskalasi penolakan masyarakat/mahasiswa Sumbar terhadap RUU KUHP dan revisi UU KPK yang menyebabkan intensnya aksi unjuk rasa dilakukan di berbagai kota di Sumbar. Pada aksi unjuk rasa terakhir yang berlangsung didepan gedung DPRD Prov. Sumbar pada tanggal 25 September 2019, massa pengunjung rasa merusak sejumlah fasilitas utama di gedung DPRD Prov. Sumbar.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 26 September 2019 dan diikuti oleh Gubernur Sumbar, Pimpinan DPRD Sumbar, Kapolda Sumbar, Wakajati Sumbar, Danrem 032/Wirabreja, Dan Lantamal II Padang, Danlanud Sutan Sjahrir, Kepala BIN Daerah Sumbar, Asisten III Setda Prov Sumbar, dan dari Badan Kesbangpol Prov. Sumbar.

Adapun poin poin penting yang dibahas dalam rapat adalah :

- Aksi unjuk rasa mahasiswa di Sumbar dilakukan sejak awal bulan September dan telah berlangsung beberapa kali hingga minggu keempat September. Selain menyoroti RUU KUHP dan revisi UU KPK, aliansi mahasiswa di Sumbar juga menyoroti sejumlah isu lokal termasuk persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di provinsi Riau dan Jambi, yang dampaknya cukup terasa hingga ke beberapa kabupaten/kota di Sumbar.
- Berdasarkan keterangan dari Kepala BIN Daerah Sumbar, pola unjuk rasa di seluruh Indonesia nyaris sama. Unjuk rasa diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang awalnya berlangsung tertib, namun menjelang sore hari biasanya aksi disusupi oleh kelompok yang membawa agenda tertentu dengan tuntutan yang tak rasional seperti menuntut diberhentikan sejumlah menteri. BIN Daerah Sumbar menyatakan, aksi aksi murni mahasiswa diseluruh Indonesia termasuk di Sumbar telah ditunggangi oleh kelompok bernama Anarko, yang merupakan kelompok kiri. Ada indikasi dari gerakan kelompok ini yang mengarah pada agenda ingin menurunkan Presiden RI dari jabatannya.
- Anarkisme yang terjadi di gedung DPRD Sumbar pada tanggal 25 September 2019 sangat tidak sesuai dengan karakter masyarakat Minang. Selama ini, setiap aksi unjuk rasa di Sumbar selalu berjalan dengan tertib
- Untuk mengantisipasi adanya agenda lain dalam aksi mahasiswa, khususnya menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal 19 Oktober 2019, TNI dan Polri telah bersiaga dan meningkatkan koordinasi dengan sektor sektor di kabupaten/kota.
- Pemerintah provinsi Sumbar akan melakukan antisipasi dan meningkatkan pengamanan khususnya pada pusat pusat pemerintahan di Sumbar agar tak terjadi lagi aksi pengrusakan seperti yang terjadi di gedung DPRD Sumbar.
- Gubernur Sumbar bersedia menerima perwakilan mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan, sepanjang tidak ada aksi

- aksi yang merendahkan martabat Gubernur selaku pimpinan daerah dan wakil pemerintah pusat di provinsi.
- Penyusunan RUU KUHP dan revisi UU KPK merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tak dapat diganggu oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya bisa menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya kepada pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Untuk menyejukkan suasana, pemerintah daerah dapat menghadirkan tokoh tokoh agama, masyarakat, dan tokoh adat untuk duduk bersama sehingga mampu menghimbau masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif.

Selain mengadakan rapat dengan tim Forkopimda, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan tim Forkopimda Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

- Pelaksanaan Upacara Dalam Rangka HUT Komando Daerah Militer I Bukit Barisan (Kodam I/BB) pada tanggal 20 Juni 2019. Pada HUT ke 69 tersebut, Pangdam I/BB Mayjen TNI M.S. Fadhilah menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk membangun kembali harmoni kehidupan yang didasari oleh nilai nilai luhur bangsa.
- Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa/Nagari (TMMD/N), di kabupaten Padang Pariaman dan kabupaten Kep. Mentawai.
- Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten/Kota.
- Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forkopimda di Bogor pada tanggal 13 November 2019 yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan dihadiri oleh sekitar 2.693 peserta yang terdiri atas kepala daerah, DPRD, kepolisian, kejaksaan, dan TNI, dengan tema "Sinergi Pelaksanaan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju". Rakornas ini bertujuan untuk menyamakan visi dan persepsi seluruh unsur pimpinan daerah dalam rangka mensukseskan program program nasional. Dalam rakornas ini, Presiden RI, Joko Widodo turut memberikan arahan, terutama tentang pentingnya keselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan negara, khususnya menghadapi fenomena perlambatan ekonomi yang tengah melanda dunia.
- Kegiatan Sumatera Barat Expo Tahun 2019 di Medan pada tanggal 14 – 17 November 2019 yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dilangsungkan di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara dan dihadiri oleh pejabat dari Kodam I Bukit Barisan, Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Utara, jajaran Forkopimda dan OPD Sumatera Utara, Forkopimda dan OPD kota Medan serta Forkopimda dan perwakilan OPD Provinsi Sumatera Barat, yakni Dan Lanud Sutan Sjahrir, Kol. Pnb. Purwanto, perwakilan dari Kejati Sumbar dan perwakilan dari Korem 032/Wirabraja, didampingi oleh pejabat terkait dari Badan Kesbangpol Prov. Sumbar. Kegiatan Sumbar Expo merupakan ajang promosi budaya, kesenian maupun produk unggulan Sumbar yang diadakan setiap tahun oleh pemerintah provinsi Sumbar melalui Badan Penghubung Prov. Sumbar di kota kota besar yang berbeda.

b. Outcome

Terjalannya koordinasi dengan Forkopimda Sumatera Barat dan instansi terkait dalam penanganan isu-isu strategis di daerah

c. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
Belum maksimalnya sinergitas antar anggota Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dalam menjawab permasalahan menyangkut peningkatan keamanan dan kenyamanan

- Solusi
Perlu lebih lanjut mengintensifkan pertemuan dan koordinasi dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan mencari solusi dan pemecahan permasalahan yang lebih optimal.

7. Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat

a. Output

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi penanganan organisasi aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat (PAKEM) bagi tokoh masyarakat/agama/pemuda dan monitoring perkembangan aliran kepercayaan masyarakat di Sumbar berkerja sama dengan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Sumbar.

Hasil Sosialisasi Penanganan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat

Sosialisasi dilaksanakan di Bunda Hotel Kota Padang dengan peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari tokoh pemuda/agama/masyarakat dari kalangan ormas yang ada di Sumatera Barat diantaranya PW NU Prov Sumbar, PW IPPNU Sumbar, Majelis Ta'lim Indonesia, BAZNAS, MUI, Majelis Dakwah Islamiah, Dewan Masjid Indonesia, PMII Sumbar, BADKO HMI Sumbar, LPTQ, Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, PW Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mubaligh Sumbar, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, FKUB Prov Sumbar, Ittihadul Mubaligh Prov Sumbar, ICMI, BKPRMI, Muslimat NU, HMI Cabang Padang, KNPI, PW Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Pimpinan Wilayah Nasyiatul 'Aisyiyah Sumatera Barat. Narasumber pada kegiatan ini terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumbar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Sumbar dan Kepala Badan Kesbangpol Prov Sumbar. Adapun hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sosialisasi penanganan aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat ini sebagai berikut :

- 1) Terhimpunnya segala informasi dan permasalahan terkait aliran kepercayaan yang muncul dan meresahkan masyarakat di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat serta solusi dan pemecahan permasalahannya agar terhindar dari aliran sesat dan menyesatkan dalam kehidupan keagamaan dalam masyarakat.
- 2) Adanya persamaan persepsi antara Aparatur Pemerintah Provinsi dengan Tokoh Masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi menyangkut Organisasi Keagamaan dan Aliran kepercayaan yang muncul dan meresahkan masyarakat Barat.

Hasil monitoring perkembangan aliran kepercayaan masyarakat di Sumbar

Pada tahun 2019, Badan Kesbangpol Prov Sumbar telah melakukan pemantauan kw kab/kota di Sumbar terkait aliran kepercayaan masyarakat yang ada di daerah dengan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Sumbar. Berdasarkan pemantauan dan koordinasi dengan aparat pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Ada 18 Aliran Sesat yakni Aliran yang dilarang tersebut adalah *Jamiyatul Islamiyah, Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Cabang Padang, Ajaran Jamaah Keimanan, Ajaran Al Qiyadah Al-Islamiyah Cabang Padang (kemudian diyakini berkembang menjadi Gafatar), Ajaran Attazkir, Tarekat Khasatariyah, Ajaran Yamisah, Ajaran Al Qiyadah Al- Islamiyah Cabang Pesisir Selatan, Pengajian Abdul Karim Jamak, Al-Jamaah Quran dan Hadist, Ajaran Payung Tigo Sakaki, Ahmadiyah Tanah Datar, Ajaran Zaini Datuak Rangkayo Besar, Ajaran Kerajaan Islam Internasional, Rukun 13, Islam Jamaah, Buya Zed, dan Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah (Dermoga).*

2. Aliran yang dibawah pengaawasan yakni *Naqsabandiyah, Ajaran Perkumpulan Siswa-siswa Alkitab Saksi-saksi Yehova, Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) Cabang Padang, Tauhid Centre, LDII Batusangkar Tanah Datar dan Yayasan Kharisma Usada Mustika (Yakum).*
3. Aliran yang tidak ditemukan lagi yakni *Baha'i, Ajaran Agama Allah dan Inkarussunnah, Ajaran Ilmu Sejati dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Padang Aro.*
4. Aktifitas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dinyatakan sudah tidak aktif di Sumbar.
5. Sedangkan untuk Ahmadiyah masih beraktifitas tetapi tidak boleh menyebarkan keyakinan dan ini langsung dibawah pengawasan Bakopakem Sumatera Barat

b. Outcome

Terdatanya aliran kepercayaan di Sumbar dan menurunnya jumlah aliran kepercayaan yang menyimpang di Sumbar

c. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
Masih adanya paham sesat yang berkembang di tengah masyarakat dan melemahkan aqidah umat Islam di Sumbar. Kemunculan paham sesat ini dapat memecah umat Islam dan terjadi gangguan keamanan di dalam kehidupan masyarakat.
- Solusi
Perlu optimalisasi peran Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Timkor Pakem) yang beranggotakan Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan organisasi keagamaan, dalam pengawasan perkembangan paham kepercayaan di masyarakat, pengawasan ini dilakukan guna mencegah terjadinya penistaan terhadap salah satu agama yang diakui oleh negara Indonesia dan keamanan serta kestabilan keamanan masyarakat.

8. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumbar

a. Output

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya rakor FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan pembinaan kerukunan umat beragama di 19 kab/kota se-Sumbar.

Pelaksanaan Rakor FKUB tanggal 9 September 2019

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rakor FKUB di Bunda Hotel Kota Padang dengan peserta 60 orang yang terdiri dari anggota FKUB Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Maksud diselenggarakannya Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi tokoh agama, dan aparatur pemerintah tentang kerukunan antar umat beragama.
- 2) Memahami secara mendalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam mengaplikasikannya ditengah masyarakat kita yang berbeda agama di daerah.

Adapun narasumber yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat, Kabinda Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Kesbangpol Prov Sumbar dan Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Prov Sumbar. Materi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Provinsi dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama.
2. Pemantapan Kerukunan Umat Beragama
3. Optimalisasi Peran FKUB dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat

4. Deteksi dini dan antisipasi ATHG KUB di Sumatera Barat
5. Sinergitas Unsur terkait dalam upaya optimalisasi Peran FKUB

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Supaya lebih di tingkatkan lagi persatuan dan persamaan persepsi dari peserta rapat dalam meredam/menyelesaikan permasalahan yang akan timbul tentang Kerukunan Umat Beragama yang muncul secara maksimal di Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang.
- b. Terjalinnnya rasa persatuan sesama FKUB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Hasil pembinaan kerukunan umat beragama di daerah

Badan Kesbangpol Prov Sumbar secara intensif melakukan pembinaan ke kabupaten/kota untuk pemberdayaan FKUB di daerah sebagai upaya deteksi dini dan meredam potensi konflik di tengah masyarakat. Peran FKUB sangat membantu Pemerintah Daerah dalam menyikapi beberapa permasalahan keagamaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan ke daerah terkait peran FKUB di daerah diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Secara umum, FKUB di daerah dinilai telah memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di daerah, namun dalam pelaksanaan perannya, FKUB masih dihadapkan dengan permasalahan dukungan pendanaan, sarana dan prasarana, SDM dan lain-lain.
- b. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh FKUB selalu dipantau oleh tim FKDM dan Kominda di masing-masing daerah dan hasilnya dilaporkan kepada Kesbangpol di daerah termasuk ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kabupaten/Kota yang belum membentuk FKUB sampai saat ini adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa pertimbangan Kepala Daerah dengan adanya pembentukan FKUB di daerah tersebut. Pembentukan FKUB bisa memunculkan gejolak di tengah masyarakat yang masyarakatnya mayoritas muslim.
- d. Masih banyak masyarakat di daerah terutama kalangan awam, belum mengetahui tentang kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Demikian juga mayoritas dari mereka belum mengenal apa FKUB dan perannya. Karenanya, dalam melaksanakan tugasnya FKUB diharapkan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat baik dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga pemerintah.

b. Outcome

Meningkatnya kerukunan umat beragama di Sumatera Barat.

c. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
Masih ada kab/kota yang belum membentuk FKUB sampai saat ini.
- Solusi
Untuk pembentukan FKUB di daerah yang belum terbentuk, perlu disurati melalui surat Gubernur dan perlu dilakukan pembinaan secara intensif untuk mendorong pembentukan FKUB di daerah tersebut.

9. Kegiatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumbar.

a. Output

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya verifikasi berkas PAW anggota DPRD kabupaten/kota. Kegiatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat ini bertujuan untuk memfasilitasi calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi calon pengganti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus dalam rangka menghimpun data keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Sebelum melakukan verifikasi berkas PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan pihak terkait lainnya untuk mengadakan klarifikasi terhadap suatu permasalahan dalam pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Adapun hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari ;
 - 1) **Ennaidi, S.Sos** yang menggantikan **Wilman Singkuan Dt Parpatih, S.Sos MM**, dari Partai Demokrat Kota Payakumbuh, karena yang bersangkutan diberhentikan dan meninggal dunia.
 - 2) **Budi Harto, S.Ag** yang menggantikan **Amran J Piliang** yang diusulkan oleh Partai Golongan Karya Kabupaten Agam karena yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Tersedianya data Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, serta data Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diganti (Penggantian Antar Waktu) di Sumatera Barat, sebagaimana yang tertera pada tabel berikut :

ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT (PERIODE 2019-

2024)

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAPIL
1.	Desrio Putra, St	Gerindra	Sumbar 1
2.	H. Hidayat, SS, MH	Gerindra	Sumbar 1
3.	Evi Yandri Rajo Budiman	Gerindra	Sumbar 1
4.	Albert Hendra Lukman	PDI Perjuangan	Sumbar 1
5.	H. Afrizal, SH, MH	Golkar	Sumbar 1
6.	H. Gustami Hidayat, S.Pt, MP	PKS	Sumbar 1
7.	H. Rahmat Saleh	PKS	Sumbar 1
8.	H. Indra Dt Rajo Lelo, SH. MH	PAN	Sumbar 1
9.	H. Maigus Nasir, S.Pd	PAN	Sumbar 1
10.	H. Suwirpen Suib, S.Sos	Demokrat	Sumbar 1
11.	Firdaus, SH.I	PKB	Sumbar 2
12.	Tri Suryadi	Gerindra	Sumbar 2
13.	Jempol	Gerindra	Sumbar 2
14.	Dra. Siti Izati Azis	Golkar	Sumbar 2

15.	Muhammad Ridwan, S.IP	PKS	Sumbar 2
16.	Muhammad Ikhbal, SE	PAN	Sumbar 2
17.	H.M. Nurnas, ST	Demokrat	Sumbar 2
18.	Ismunandi Syofyan, SE	Gerindra	Sumbar 3
19.	Lazuardi Erman, SH	Golkar	Sumbar 3
20.	H. Rinaldi, SP dt Rajo Mangkuto	PKS	Sumbar 3
21.	H. Rafdinal, SH	PKS	Sumbar 3
22.	H. M. Syafril Huda	PPP	Sumbar 3
23.	Adri Warman, S.Sos, MM	PAN	Sumbar 3
24.	H. Ismet Amzis, SH	Demokrat	Sumbar 3
25.	H. Nofrison, S.Sos	Demokrat	Sumbar 3
26.	Donizar	PKB	Sumbar 4
27.	Hj. Yunisra Syahiran, S.Pd	Gerindra	Sumbar 4
28.	Khairuddin Simanjuntak	Gerindra	Sumbar 4
29.	Syamsul Bahri	PDI Perjuangan	Sumbar 4
30.	H. Benny Utama, SH, MM	Golkar	Sumbar 4
31.	H. Ihpan	PKS	Sumbar 4
32.	Muzli M Nur, S.Pd	PAN	Sumbar 4
33.	Sawal, SH	PPP	Sumbar 4
34.	Sabar AS, S.Ag	Demokrat	Sumbar 4
35.	Nurkhalis Dt Bijo Dirajo, S.Pt	Gerindra	Sumbar 5
36.	Supardi	Gerindra	Sumbar 5
37.	Safaruddin Dt Bandaro Rajo, SH	Golkar	Sumbar 5
38.	H. Irsyad Syafar, M.Ed	PKS	Sumbar 5
39.	H. Doddy Delvy, SE	PAN	Sumbar 5
40.	Darman Sahladi, SE, MM	Demokrat	Sumbar 5
41.	Rico Alvano, SH	PKB	Sumbar 6
42.	Mesra	Gerindra	Sumbar 6
43.	Drs. H. Syafaruddin Putra Dt S	Gerindra	Sumbar 6
44.	Leli Arni, S.Pd	PDI Perjuangan	Sumbar 6
45.	Ir. H. Hendra Irwan Rahim	Golkar	Sumbar 6
46.	Taufik Syahril	Nasdem	Sumbar 6
47.	Budiman Dt Malano Garang, S.Ag	PKS	Sumbar 6
48.	Yosrizal	PAN	Sumbar 6
49.	H. Syahrul Furqon, SKM	PAN	Sumbar 6
50.	Jefri Marsul	Demokrat	Sumbar 6
51.	Ir. H. Arkadius Dt Intan Bano	Demokrat	Sumbar 6
52.	Mario Syah Johan	Gerindra	Sumbar 7
53.	H. Khairunas, S.IP, M.Si	Golkar	Sumbar 7
54.	Drs. Nurfirmawansyah, MM. Apt	PKS	Sumbar 7

55.	H. Darwipetra, SE, M.Si Dt M A	PPP	Sumbar 7
56.	Irwan Afriadi	Nasdem	Sumbar 7
57.	Ahmad Rius, SH	PAN	Sumbar 7
58.	H. Irzal Ilyas dt Lawik Basa, MM	Demokrat	Sumbar 7
59.	Mukhlis Yusuf Abit, ST, MM	Gerindra	Sumbar 8
60.	Zarfi Deson, SH	Golkar	Sumbar 8
61.	Bakri Bakar	Nasdem	Sumbar 8
62.	Hamdanus, S.FIL I, M.Si	PKS	Sumbar 8
63.	Imral Adenansi, SH, MH	PPP	Sumbar 8
64.	Hayatul, SE	PAN	Sumbar 8
65.	Ali Tanjung	Demokrat	Sumbar 8

ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT

1. Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAPIL
1.	Aprinal Tanjung SH, Dt Rj M	Gerindra	Pessel 1
2.	Drs. Daskom, M.Pd	PDI Perjuangan	Pessel 1
3.	Syafril Saputra	Golkar	Pessel 1
4.	Al Ermon, SH	Nasdem	Pessel 1
5.	Feby Rifly, SH	PKS	Pessel 1
6.	Julianavia, SH, M.Si	PPP	Pessel 1
7.	Marzan	PAN	Pessel 1
8.	Hanafi Herman, S.Pt	Demokrat	Pessel 1
9.	Indra Wijaya	PKB	Pessel 2
10.	Drs. Pardinal, M.Si Dt Tan Kiamek	Gerindra	Pessel 2
11.	Fetmadarni	PDI Perjuangan	Pessel 2
12.	Mahmud Yosrizal	Golkar	Pessel 2
13.	H. Aprial Habbas Buya Piai, SH,MM	Nasdem	Pessel 2
14.	Irjal, SE	PKS	Pessel 2
15.	Ermizen, S.Pd	PAN	Pessel 2
16.	Robi Binur	Demokrat	Pessel 2
17.	Alkisman, S.IP	PBB	Pessel 2
18.	Aprizal, SH	PKB	Pessel 3
19.	Herpi Damson Epi Kampai, S.IP	Gerindra	Pessel 3
20.	Sri Kumala Dewi, S.Pd.I	PDI Perjuangan	Pessel 3
21.	Ermiwati, SH	Golkar	Pessel 3
22.	Almasri S, SH	Nasdem	Pessel 3
23.	Drs. Jamalus, SH	PKS	Pessel 3
24.	Drs. Erman Sawar	PPP	Pessel 3

25.	Darwiadi, SH	PAN	Pessel 3
26.	Abdul Muis, SE	Hanura	Pessel 3
27.	Ikal Jonedi	Demokrat	Pessel 3
28.	Yuslimardan	PBB	Pessel 3
29.	Rahman, S.Ag	PKB	Pessel 4
30.	Harianto	Gerindra	Pessel 4
31.	Zainal Aripin	Nasdem	Pessel 4
32.	Pardis, A.Md	PKS	Pessel 4
33.	Novermal, SH	PAN	Pessel 4
34.	Nasrul Hartono, S.IP	Hanura	Pessel 4
35.	Jamalus Yatim	Demokrat	Pessel 4
36.	Hakimin	Gerindra	Pessel 5
37.	Ronaldi, A.Md	PDI Perjuangan	Pessel 5
38.	Dedi Hermanto Putra, S.IP	Golkar	Pessel 5
39.	Aljufri, SH. MH	Nasdem	Pessel 5
40.	Hardianto	Berkarya	Pessel 5
41.	Yusman, S.Ag, MM	PKS	Pessel 5
42.	Irwan, A.Md	Perindo	Pessel 5
43.	Armadi, A.Md	PPP	Pessel 5
44.	Kusmanto, S.IP	PAN	Pessel 5
45.	Awarisman	Demokrat	Pessel 5

2. Kabupaten Solok

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAPIK
1.	Dodi Hendra	Gerindra	Solok 1
2.	Iskan Nofis	Gerindra	Solok 1
3.	Zamroni, SH	PDI Perjuangan	Solok 1
4.	Yetti Aswaty, SH	Golkar	Solok 1
5.	M. Hidayat, B.Sc	Nasdem	Solok 1
6.	Nosa Ekananda, S.Pd	PKS	Solok 1
7.	Dendi, S.Ag, MA	PPP	Solok 1
8.	Renaldo Gusmal, SE	PAN	Solok 1
9.	Aurizal, S.Pd	PAN	Solok 1
10.	Sutan Muhammad Bahri	Hanura	Solok 1
11.	Lucky Effendi	Demokrat	Solok 1
12.	Seprismen	Gerindra	Solok 2
13.	Armen Plani	Nasdem	Solok 2
14.	Drs. Nazar Bakri	PKS	Solok 2
15.	Masri Bakar, SE	PPP	Solok 2

16.	Drs. Ahmad Purnama	PAN	Solok 2
17.	Dian Anggraini, SH	Demokrat	Solok 2
18.	Jon Firman Pandu	Gerindra	Solok 3
19.	Surimariadi	PDI Perjuangan	Solok 3
20.	Olzaheri	Golkar	Solok 3
21.	Jamris	Nasem	Solok 3
22.	Yusferdizen	PKS	Solok 3
23.	Nelson	PPP	Solok 3
24.	Ivoni Munir	PAN	Solok 3
25.	Faizal	PAN	Solok 3
26.	Mulyadi	Demokrat	Solok 3
27.	Hafni Hafiz	Gerindra	Solok 4
28.	Arlon	Gerindra	Solok 4
29.	Mukhnaldi	Golkar	Solok 4
30.	Azwirman	Nasdem	Solok 4
31.	Harry Pawestrie	PKS	Solok 4
32.	M. Sukri	PPP	Solok 4
33.	Etranedi	PAN	Solok 4
34.	Syukri Firman	Hanura	Solok 4
35.	Efdizal, SH	Denokrat	Solok 4

3. Kabupaten Sijunjung

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAJIL
1.	Desriwan, SE	PKB	Sijunjung 1
2.	Delfirman	Gerindra	Sijunjung 1
3.	Yusnidarti, SH, MM	Golkar	Sijunjung 1
4.	Syofyan Hendri, S.PdI	PKS	Sijunjung 1
5.	Stasmi Ultriadi	Perindo	Sijunjung 1
6.	April Marsal, S.Pd	PPP	Sijunjung 1
7.	Drs. H. Efrineldi Nangkodo, STP	Nasdem	Sijunjung 1
8.	Bakri, SH	Demokrat	Sijunjung 1
9.	Aroni Daspi, ST	PAN	Sijunjung 1
10.	Almasta Boy	PKB	Sijunjung 2
11.	Rusdi Antoni	Gerindra	Sijunjung 2
12.	Givo Aldino	PDI Perjuangan	Sijunjung 2
13.	Elva Endayani, A.Md	Golkar	Sijunjung 2
14.	Ir. Amrizal	Nasdem	Sijunjung 2
15.	Antonio Oksa Mursil, SE	PKS	Sijunjung 2
16.	Zalmiati	PAN	Sijunjung 2

17.	Walbadri	Demokrat	Sijunjung 2
18.	Emelda Wiguna, S.Pd	PKB	Sijunjung 3
19.	Bambang Surya Irawan	Gerindra	Sijunjung 3
20.	Sarikal	Golkar	Sijunjung 3
21.	Sukardi	Nasdem	Sijunjung 3
22.	Hendri Susanto	PKS	Sijunjung 3
23.	Mukhlis, SH.I	PPP	Sijunjung 3
24.	Afrizal, PB	PAN	Sijunjung 3
25.	Sabirin	Demokrat	Sijunjung 3

4. Kabupaten Tanah Datar

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAJIL
1.	Jonnedi, SE	Gerindra	Tanah Datar 1
2.	Asrul Jusan	PDI Perjuangan	Tanah Datar 1
3.	Syafaruddin Dt Marajo	Golkar	Tanah Datar 1
4.	Istiqlal	PKS	Tanah Datar 1
5.	Nurzal	PKS	Tanah Datar 1
6.	Arianto	PPP	Tanah Datar 1
7.	Jasmadi, ST	PAN	Tanah Datar 1
8.	Wadra Wati	Hanura	Tanah Datar 1
9.	Eri Hendri, SP	Demokrat	Tanah Datar 1
10.	Kamrita, S.Pd	Gerindra	Tanah Datar 2
11.	Herman Sugiarto, SH	Golkar	Tanah Datar 2
12.	Adrijinil Simabura, SH	Nasdem	Tanah Datar 2
13.	Abu Bakar, Lc	PKS	Tanah Datar 2
14.	Agus Topik	PPP	Tanah Datar 2
15.	Alimuhar St Tunaro	PAN	Tanah Datar 2
16.	Mhd. Haekal, SH	Hanura	Tanah Datar 2
17.	Dra. Donna	Demokrat	Tanah Datar 2
18.	H. Rony Mulyadi Dt Bungsu	Gerindra	Tanah Datar 3
19.	Afrizal Dt Rajo Lenggang	Gerindra	Tanah Datar 3
20.	Afriman Dt Majo Indo	PDI Perjuangan	Tanah Datar 3
21.	Dedi Irawan	Golkar	Tanah Datar 3
22.	Nova Hendria	Nasdem	Tanah Datar 3
23.	Saidani, SP	PKS	Tanah Datar 3
24.	Zulhadi, M.Pd	PPP	Tanah Datar 3
25.	Benny Ermon	PAN	Tanah Datar 3
26.	Syafiril, SH	Demokrat	Tanah Datar 3
27.	Surva Hutri	Gerindra	Tanah Datar 4

28.	Drs. H. Azwar	Gerindra	Tanah Datar 4
29.	Anton Yondra, SE	Golkar	Tanah Datar 4
30.	Khairul Abdi	Nasdem	Tanah Datar 4
31.	Dekminil	PKS	Tanah Datar 4
32.	Yalpema Jurin	PPP	Tanah Datar 4
33.	Zulli Rustam	PAN	Tanah Datar 4
34.	Benny Apero	Hanura	Tanah Datar 4
35.	Nurhamdi Zahari	Demokrat	Tanah Datar 4

5. Kabupaten Padang Pariaman

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAPIK
1.	Syafrinaldi	PKB	Pdg Pariaman 1
2.	Edirizal	Gerindra	Pdg Pariaman 1
3.	Mulyadi, SH	Gerindra	Pdg Pariaman 1
4.	Rahmad Mahmudal	Golkar	Pdg Pariaman 1
5.	Mothia Azis	Nasdem	Pdg Pariaman 1
6.	Yuliasman	PKS	Pdg Pariaman 1
7.	Wardiana MZ	PPP	Pdg Pariaman 1
8.	Makmur, SE	PAN	Pdg Pariaman 1
9.	Eveni	Hanura	Pdg Pariaman 1
10.	H. Surisman Syukur, SE	Demokrat	Pdg Pariaman 1
11.	Hasan Basri, SE	PKB	Pdg Pariaman 2
12.	Happy Neldy, SE, MM	Gerindra	Pdg Pariaman 2
13.	Hamardian	Gerindra	Pdg Pariaman 2
14.	Jondedi	PDI Perjuangan	Pdg Pariaman 2
15.	Syahrul Dt Lung	Golkar	Pdg Pariaman 2
16.	Ir. Munafestoni	Nasdem	Pdg Pariaman 2
17.	Suryadi Zuhri Ali, ST	PKS	Pdg Pariaman 2
18.	Siswanto	PPP	Pdg Pariaman 2
19.	Drs. Rosman	PAN	Pdg Pariaman 2
20.	Topik Hidayat, S.IP	PAN	Pdg Pariaman 2
21.	Januar Bakri, SH	Demokrat	Pdg Pariaman 2
22.	Moh. Zaher	PKB	Pdg Pariaman 3
23.	Ir. H. Arwinsyah, MT	Gerindra	Pdg Pariaman 3
24.	Harpianda, SH	Gerindra	Pdg Pariaman 3
25.	Dasmar	Golkar	Pdg Pariaman 3
26.	Jon Hendri	PKS	Pdg Pariaman 3
27.	Dewi Warman, SH, MH	PPP	Pdg Pariaman 3
28.	Erman	PAN	Pdg Pariaman 3

29.	Rahman Rizal	PAN	Pdg Pariaman 3
30.	Zul Effendi	Demokrat	Pdg Pariaman 3
31.	Afredison	PKB	Pdg Pariaman 4
32.	Ramli, S.Sos	Gerindra	Pdg Pariaman 4
33.	Yusri	PDI Perjuangan	Pdg Pariaman 4
34.	Syafrizal A, SH	Golkar	Pdg Pariaman 4
35.	Alfa Edison	Nasdem	Pdg Pariaman 4
36.	Risdianto, ST	PKS	Pdg Pariaman 4
37.	Ir. Syafruddin S	PPP	Pdg Pariaman 4
38.	Aprinaldi, M.Pd	PAN	Pdg Pariaman 4
39.	Dedi Salim	PAN	Pdg Pariaman 4
40.	Basir, SH	Democrat	Pdg Pariaman 4

6. Kabupaten Agam

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAPIL
1.	Nesi Harmita, ST	Gerindra	Agam 1
2.	Joni Putra, S.Kom, MM	Golkar	Agam 1
3.	Syafrizal	Berkarya	Agam 1
4.	Asdinar	PKS	Agam 1
5.	H. Gema Saputra, ST	PPP	Agam 1
6.	Antonis, S.HI	PAN	Agam 1
7.	Epi Suardi	Hanura	Agam 1
8.	Marga Indra Putra, S.Pd	Demokrat	Agam 1
9.	Noveri Edios	PBB	Agam 1
10.	Armalicon	Gerindra	Agam 2
11.	A.R. Yustinof, S.Pd	Golkar	Agam 2
12.	Riski Abdillah Fadhal, S.TP	PKS	Agam 2
13.	Yopi Eka Antoni, SE, ME	PPP	Agam 2
14.	Zulparidi, S.Ag	PAN	Agam 2
15.	Jondra Marjaya	Demokrat	Agam 2
16.	Novi Irwan, S.Pd. MM	Gerindra	Agam 3
17.	Edwar H, S.Ag Dt Basa	Gerindra	Agam 3
18.	Ir. Fairisan Dt Piranggo	Golkar	Agam 3
19.	Mardanis	Nasdem	Agam 3
20.	Safruddin, SS	PKS	Agam 3
21.	Hendrizar	PAN	Agam 3
22.	Syafril, SE	Demokrat	Agam 3
23.	Zulhefi, S.Ikom, M.Ikom	Gerindra	Agam 4
24.	Rinal Wahyudi, SH	Gerindra	Agam 4

25.	Arman J Piliang	Golkar	Agam 4
26.	Drs.Ais Bakri, MM	Nasdem	Agam 4
27.	Suharman	PKS	Agam 4
28.	H. Ridwan Suhaili, M.Ed	PPP	Agam 4
29.	Syaflin, S.HI	PAN	Agam 4
30.	Doddi, ST	Demokrat	Agam 4
31.	Bulqaini, S.Phil I	PBB	Agam 4
32.	Erdinal, S.Sos	Gerindra	Agam 5
33.	Zulhendri Bandaro Labiah	Gerindra	Agam 5
34.	Zulfahmi, SH, M.Kn	Golkar	Agam 5
35.	Guswardi	PKS	Agam 5
36.	Asrizal	PKS	Agam 5
37.	Irfawaldi, SH	PPP	Agam 5
38.	Salman Linover	PAN	Agam 5
39.	Aderia, SP. MM	Demokrat	Agam 5
40.	Drs. Feri Andrianto, MM	Demokrat	Agam 5
41.	Alhamdi Arif, S,Pd	Gerindra	Agam 6
42.	Suhermi, S.Pd	PKS	Agam 6
43.	Mardisal Athan	PPP	Agam 6
44.	Irfan Amran	PAN	Agam 6
45.	Syaharuddin	Demokrat	Agam 6

7. Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAPIL
1.	Irwin Idrus	Gerindra	Lima Puluh Kota 1
2.	Akmal Rustam	PDI Perjuangan	Lima Puluh Kota 1
3.	Ir. Afri Yunaldi, IPM	Golkar	Lima Puluh Kota 1
4.	Beni Murdani	PKS	Lima Puluh Kota 1
5.	Emrizal J, SE	PPP	Lima Puluh Kota 1
6.	Marsanova Andesra	PAN	Lima Puluh Kota 1
7.	H. Zuhatri	Hanura	Lima Puluh Kota 1
8.	Alfian	Demokrat	Lima Puluh Kota 1
9.	Irman Tedi	Gerindra	Lima Puluh Kota 2
10.	H. Darlius	PDI Perjuangan	Lima Puluh Kota 2
11.	Syamsul Mikar	Golkar	Lima Puluh Kota 2
12.	Gusti Randa	Hanura	Lima Puluh Kota 2
13.	Syamsu Wirman	Demokrat	Lima Puluh Kota 2
14.	Asrul	PKB	Lima Puluh Kota 3
15.	Virmadona, S.Sos	Gerindra	Lima Puluh Kota 3

16.	Riko Febrianto, SH	Golkar	Lima Puluh Kota 3
17.	Zukron, B.Ac	PKS	Lima Puluh Kota 3
18.	Wirman Dt Pangeran Nan Putih	PPP	Lima Puluh Kota 3
19.	Mulyadi, ST, ME	PAN	Lima Puluh Kota 3
20.	Drs. Epi Suardi	Hanura	Lima Puluh Kota 3
21.	Sastri Andriko, SH	Demokrat	Lima Puluh Kota 3
22.	Hemmy Setiawan	PKB	Lima Puluh Kota 4
23.	Deni Asra	Gerindra	Lima Puluh Kota 4
24.	Mhd. Afdal	Gerindra	Lima Puluh Kota 4
25.	Putra Satria Veri	Golkar	Lima Puluh Kota 4
26.	Alia Efendi	Nasdem	Lima Puluh Kota 4
27.	Yos Sariadi, S.Ag	PKS	Lima Puluh Kota 4
28.	Akrimal Adam	PAN	Lima Puluh Kota 4
29.	Arsi Medes	Hanura	Lima Puluh Kota 4
30.	Marshal, B.Ac	Demokrat	Lima Puluh Kota 4
31.	Khairul Apit	Gerindra	Lima Puluh Kota 5
32.	Doni Ikhlas, SH	Golkar	Lima Puluh Kota 5
33.	Bisron Hadi	PKS	Lima Puluh Kota 5
34.	Dra. Ridhawati	PPP	Lima Puluh Kota 5
35.	Wendi Candra, ST	Demokrat	Lima Puluh Kota 5

8. Kabupaten Pasaman

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAPIL
1.	Welly Suheri	PKB	Pasaman 1
2.	Rahmi Wahidah	Gerindra	Pasaman 1
3.	Eka Hariani Sandra	Golkar	Pasaman 1
4.	Danny Ismaya, SP	PKS	Pasaman 1
5.	Ristawadi, ST	Demokrat	Pasaman 1
6.	Karman	Gerindra	Pasaman 2
7.	M. Maradongan Nasution	PDI Perjuangan	Pasaman 2
8.	Hamdan	Golkar	Pasaman 2
9.	Yusrizal	Nasdem	Pasaman 2
10.	Aprial	PKS	Pasaman 2
11.	Yulius Erita, S.Ag	PPP	Pasaman 2
12.	Arivatana, S.Pd	PAN	Pasaman 2
13.	Leon Fitra Irfan	Hanura	Pasaman 2
14.	Muhammad Ansyari Iubis	PKB	Pasaman 3
15.	Asraf	Gerindra	Pasaman 3
16.	Nefri Asfandi, S.Pt	PKS	Pasaman 3

17.	Bona Lubis	PPP	Pasaman 3
18.	Yulisman, A.Ma	PAN	Pasaman 3
19.	Rudi Apriasi	Demokrat	Pasaman 3
20.	Aminullah, SH	PKB	Pasaman 4
21.	Bustomi, SE	Gerindra	Pasaman 4
22.	Yasri	Golkar	Pasaman 4
23.	Salamat, SE, M.Si	Nasdem	Pasaman 4
24.	Syamri	PKS	Pasaman 4
25.	Erizal	PPP	Pasaman 4
26.	Haniful Khairi, S.Sos	PAN	Pasaman 4
27.	Mulyadi	Demokrat	Pasaman 4
28.	Jusran	PKB	Pasaman 5
29.	Martias	Gerindra	Pasaman 5
30.	Syofyan, S.Pd	Golkar	Pasaman 5
31.	Ahmad Kadafi, ST	Nasdem	Pasaman 5
32.	Farizal, M.Farm, Apt	PKS	Pasaman 5
33.	Emitrapil, A.Md	PPP	Pasaman 5
34.	Drs. H. Hendri	PAN	Pasaman 5
35.	Nelo Pribadi, ST	Demokrat	Pasaman 5

9. Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAPIL
1.	Ibrani Sababalat	PDI Perjuangan	Mentawai 1
2.	Syafridin	Nasdem	Mentawai 1
3.	Jimer Munthe, SE	Garuda	Mentawai 1
4.	Hendri Dunand, S.Sos	PAN	Mentawai 1
5.	Juni Arman, S.IP	Demokrat	Mentawai 1
6.	Parsaroan Simanjuntak, S.Th	Gerindra	Mentawai 2
7.	Nelsen Sakerebeu, S.Th	PDI Perjuangan	Mentawai 2
8.	T. Fortenmasrt Y Pardede, Amd	Golkar	Mentawai 2
9.	Isar Taileleu, S.Pak	Nasdem	Mentawai 2
10.	AK. Roberthyl Saogo, SH	Garuda	Mentawai 2
11.	Alisandre Zalukhu	Perindo	Mentawai 2
12.	Maru, SH	Gerindra	Mentawai 3
13.	Yosep, A.Md	PDI Perjuangan	Mentawai 3
14.	Julius Taikarak	PDI Perjuangan	Mentawai 3
15.	Jacob Saguruk, SE	Golkar	Mentawai 3
16.	Bruno Guimek Sagalak, S.Pd	Nasdem	Mentawai 3
17.	Stefanus Victorianus S, SH	Perindo	Mentawai 3

18.	Salimi, A.Md	PAN	Mentawai 3
19.	Rasyidin Syaiful	Hanura	Mentawai 3
20.	Fernando Sabajou	Demokrat	Mentawai 3

10. Kabupaten Dharmasraya

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAJIL
1.	Rogi Aliyas Can, Amd	PDI Perjuangan	Dharmasraya 1
2.	Sasmi Erli, S.Pd	Golkar	Dharmasraya 1
3.	Ampera Dt. Labuan basa	Nasdem	Dharmasraya 1
4.	Imron, S.Hut	PKS	Dharmasraya 1
5.	Ade Sudarman	PAN	Dharmasraya 1
6.	Ardison	Hanura	Dharmasraya 1
7.	Salman, S.Sos	Demokrat	Dharmasraya 1
8.	ST. Alif	PDI Perjuangan	Dharmasraya 2
9.	Pariyanto, SH	PDI Perjuangan	Dharmasraya 2
10.	Adi Gunawan	Golkar	Dharmasraya 2
11.	Purwanto, S.Ag	Golkar	Dharmasraya 2
12.	Cecep Nurzaman, A.Pd	Nasdem	Dharmasraya 2
13.	Iskandar	Berkarya	Dharmasraya 2
14.	Yulindo Sari Muhtar, SE	PAN	Dharmasraya 2
15.	Rosandi Sanjaya Putra	Gerindra	Dharmasraya 3
16.	Aandri Saputra	Gerindra	Dharmasraya 3
17.	Dalpewan Dt. Rajo Lelo, SE	PDI Perjuangan	Dharmasraya 3
18.	Ari Wibowo, S.Pd	PDI Perjuangan	Dharmasraya 3
19.	Amrizal, SH	Golkar	Dharmasraya 3
20.	Zulhendri	Berkarya	Dharmasraya 3
21.	Suparman, A.Ma Pd	PKS	Dharmasraya 3
22.	Drs. H. Mawarman Dt P. Mudo	Demokrat	Dharmasraya 3
23.	Boby Ade Saputra	PKB	Dharmasraya 4
24.	Alisa Septiani	Gerindra	Dharmasraya 4
25.	Syafnirwan	PDI Perjuangan	Dharmasraya 4
26.	Defrino Anwar	PDI Perjuangan	Dharmasraya 4
27.	Ferryko Effendi	Golkar	Dharmasraya 4
28.	Saparman	Nasem	Dharmasraya 4
29.	Benny Ridwan	PAN	Dharmasraya 4
30.	Raden Awaluddin, SE	PAN	Dharmasraya 4

11. Kabupaten Solok Selatan

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAPIIL
1.	David Taster, S.Sos	Gerindra	Solsel 1
2.	Zigo Rolanda, SE	Golkar	Solsel 1
3.	Afrizal Chandra, SE	Golkar	Solsel 1
4.	H. Murswal, SH	Nasdem	Solsel 1
5.	Solikhin	PKS	Solsel 1
6.	Ade Vernanda	PAN	Solsel 1
7.	Dede Pasarela	Demokrat	Solsel 1
8.	Marwan Effendi, SH	PKB	Solsel 2
9.	Abu Suid, S.P	Gerindra	Solsel 2
10.	Syafril	Golkar	Solsel 2
11.	H. Sabri, SE	Nasdem	Solsel 2
12.	Dedi Arisandi	PKS	Solsel 2
13.	Ali Sabri Abbas	PAN	Solsel 2
14.	Mesi Aswanto, S.Pd	PAN	Solsel 2
15.	Mukhlis, ST, S.Pd	PKB	Solsel 3
16.	Armen Syahjohan, S.IP	Gerindra	Solsel 3
17.	Aprinaldi Ali, SE	Gerindra	Solsel 3
18.	Roni Ismaji	Golkar	Solsel 3
19.	Zulfikar Erawadi, S.Pd	Nasdem	Solsel 3
20.	Edi Susanto, SE	Berkarya	Solsel 3
21.	Mon Nofrizhal	PKS	Solsel 3
22.	Afrizal Dt Rajo Djalil	PPP	Solsel 3
23.	Yendri Susanto	PAN	Solsel 3
24.	Albert Arifin	Demokrat	Solsel 3
25.	Wahyu Hidayat, S.Kep	PBB	Solsel 3

12. Kabupaten Pasaman Barat

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAPIIL
1.	Yulhendri Dt Putiah, SH	PKB	Pasbar 1
2.	H. Adriwilza, SE. M.Pd	Gerindra	Pasbar 1
3.	Ronal Dodya Restu, S.Kom, MTI	PDI-P	Pasbar 1
4.	Rsdi, SE	Golkar	Pasbar 1
5.	H. Yetrizal	Nasdem	Pasbar 1
6.	Supriono, S.TP	PKS	Pasbar 1
7.	Drs. H Baharuddin	PAN	Pasbar 1
8.	Syerly Puspita Indah Sari	Hanura	Pasbar 1
9.	Sifrowati	Demokrat	Pasbar 1
10.	Syafnil	PBB	Pasbar 1

11.	Ali Nasir	PKB	Pasbar 2
12.	H. Erianto	Gerindra	Pasbar 2
13.	Wahyudi	Gerindra	Pasbar 2
14.	Dedi Lesmana, S.Pt	PDI-P	Pasbar 2
15.	H. Daliyus K, S.Si	Golkar	Pasbar 2
16.	Muzar	Nasdem	Pasbar 2
17.	Masri M	PKS	Pasbar 2
18.	Wasman	PPP	Pasbar 2
20.	Syafridal	PAN	Pasbar 2
21.	Subandrio	Demokrat	Pasbar 2
22.	Endra Yama Putra	Demokrat	Pasbar 2
23.	Parizal Hafni	Gerindra	Pasbar 3
24.	Hafiz, S.Pd	Gerindra	Pasbar 3
25.	Endang Jaya Putra	PDI-perjuangan	Pasbar 3
26.	Drs. Budi Nasko	Golkar	Pasbar 3
27.	Drs. Erefriwan	Golkar	Pasbar 3
28.	Sunardi, SH	Perindo	Pasbar 3
29.	Muhammad Umar, SE	PPP	Pasbar 3
30.	H. Insan Sabri	PAN	Pasbar 3
31.	Nazwar, SH	Demokrat	Pasbar 3
32.	Juniwar, SH	Demokrat	Pasbar 3
33.	Heri Miheldi	Gerindra	Pasbar 4
34.	Meilizar	Gerindra	Pasbar 4
35.	Elfa Susanti, S.St	PDI-Perjuangan	Pasbar 4
36.	Dirwansyah	Golkar	Pasbar 4
37.	Muhammad Guntara, SH	Nasdem	Pasbar 4
38.	Hanafi Lubis	PKS	Pasbar 4
39.	H. Ifdal	PAN	Pasbar 4
40.	Sahriman	Demokrat	Pasbar 4

13. Kota Padang

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAPII
1.	Delma Putra	Gerindra	Padang 1
2.	Manufer Putra Firdaus	Gerindra	Padang 1
3.	Drs. Wismar Panjaitan, M.Pd	PDI Perjuangan	Padang 1
4.	Jumadi, SH	Golkar	Padang 1
5.	Muharlion, S.Pd	PKS	Padang 1
6.	Pun Ardi, S.Ag	PKS	Padang 1
7.	Andy Wijaya Kusuma	PKS	Padang 1

8.	Yuhilda Darwis, SE	PPP	Padang 1
9.	Rustam Effendi	PAN	Padang 1
10.	Mukhlis, SE	Demokrat	Padang 1
11.	Syafrial Kani, SH	Gerindra	Padang 2
12.	Donal Ardi	Gerindra	Padang 2
13.	Muzni Zen, SH	Gerindra	Padang 2
14.	Zulhardi Z Latif, SH, MM	Golkar	Padang 2
15.	Zalmadi, S.Hum	Berkarya	Padang 2
16.	Ja'far	PKS	Padang 2
17.	Rafdi, ST	PKS	Padang 2
18.	Dasman	PPP	Padang 2
19.	Yandri, S.Pd, M.Pd	PAN	Padang 2
20.	Salisma, SH	Demokrat	Padang 2
21.	Ely Trisyandi, SE, Akt	Gerindra	Padang 3
22.	Dewi Susanti	Gerindra	Padang 3
23.	Amran Tono, SE	Gerindra	Padang 3
24.	Miswar Jambak, SH	Golkar	Padang 3
25.	Edmon, SE	PKS	Padang 3
26.	Murikhwan	PPP	Padang 3
27.	Jupri	PAN	Padang 3
28.	Asrizal	PAN	Padang 3
29.	Surya Jufri, S.Sos	Demokrat	Padang 3
30.	Nila Kartika, A.Md	Demokrat	Padang 3
31.	Bobby Rustam	Gerindra	Padang 4
32.	Meilisa Wariwu, SH	PDI Perjuangan	Padang 4
33.	Helmi Moesim AY	Berkarya	Padang 4
34.	Drs. H. Muhidi, MM	PKS	Padang 4
35.	Amril Amin, S.AP	PAN	Padang 4
36.	Irawati Meuraksa, SP	PAN	Padang 4
37.	Ilham Maulana, SH	Demokrat	Padang 4
38.	Mastilizal AY	Gerindra	Padang 5
39.	Budi S, SH	Gerindra	Padang 5
40.	Iswanto Kwara	PDI Perjuangan	Padang 5
41.	Osman Ayub	Nasdem	Padang 5
42.	Arnedi Yarmen, S.Pd	PKS	Padang 5
43.	H. Djunaidy Hendry, ST	PKS	Padang 5
44.	Faisal Nasir	PAN	Padang 5
45.	Azwar Siry, SH, MM	Demokrat	Padang 5

14. Kota Solok

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAPII
1.	Harizal	Gerindra	Solok 1
2.	Leo Murphy	PDI Perjuangan	Solok 1
3.	Ramadhan Kirana Putra,SE, MM	Golkar	Solok 1
4.	Yutris Can, SE	Golkar	Solok 1
5.	Yoserizal, SH	Nasdem	Solok 1
6.	Taufiq Nizam	PKS	Solok 1
7.	Andi Eka Putra, SH	PPP	Solok 1
8.	Rusdi Saleh	PAN	Solok 1
9.	Rusnaldi, A.Md	Hanura	Solok 1
10.	Deni Nofri Pudung	Demokrat	Solok 1
11.	Wazaldy	PBB	Solok 1
12.	Hj. Rika Hanom, S.Pd	Gerindra	Solok 2
13.	Nasril In Dt Malintang S, SH	Golkar	Solok 2
14.	Amrinof Bias Dt Ulu G, SH	Nasdem	Solok 2
15.	Ade Merta, S.Pd	PKS	Solok 2
16.	Efriyon Coneng	PAN	Solok 2
17.	Ade Surya Dharma, ST	Hanura	Solok 2
18.	Bayu Kharisma, SH	Democrat	Solok 2
19.	Hendra Saputra, SH	PBB	Solok 2
20.	Irwan (Sari In)	PKPI	Solok 2

15. Kota Sawahlunto

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAPII
1.	H. Dasrial Ery, SE,MM	PDI Perjuangan	Sawahlunto 1
2.	Hartono	Golkar	Sawahlunto 1
3.	Lazwardi	PKS	Sawahlunto 1
4.	Ir. Neldawenti, M.Si	PPP	Sawahlunto 1
5.	Iwan Kurniawan, S.Sos	Demokrat	Sawahlunto 1
6.	Eka Wahyu, SE	PKPI	Sawahlunto 1
7.	Rio Mardani, SH	Nasdem	Sawahlunto 2
8.	Jhon Replita	Perindo	Sawahlunto 2
9.	Jaswandi, SE	PPP	Sawahlunto 2
10.	Osvita	PPP	Sawahlunto 2
11.	Syafwan Effendi	PAN	Sawahlunto 2
12.	Masrisal, SH	PKPI	Sawahlunto 2
13.	Adepron	Gerindra	Sawahlunto 3
14.	Reflizal	PDI Perjuangan	Sawahlunto 3
15.	Elfia Rita Dewi, SH	Golkar	Sawahlunto 3

16.	Ronal Kardinal, SH	Nasdem	Sawahlunto 3
17.	H. Afdal, S.Si, Apt	PKS	Sawahlunto 3
18.	Ir. Irland, Mm	PAN	Sawahlunto 3
19.	Jhoni Warta, SH	Demokrat	Sawahlunto 3
20.	Armando	PKPI	Sawahlunto 3

16. Kota Padang Panjang

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAPIIL
1.	Herman	PKB	Pdg Panjang 1
2.	Yudha Prasetya	Gerindra	Pdg Panjang 1
3.	Riza Aditya Nugraha, SH	Gerindra	Pdg Panjang 1
4.	Mahdelmi, S.Sos Dt Barbanso	Golkar	Pdg Panjang 1
5.	Yovan Fadayan Remindo,S.Ikom	Golkar	Pdg Panjang 1
6.	Imbral, SE	Nasdem	Pdg Panjang 1
7.	Micko Kristie, S.Psi	Nasdem	Pdg Panjang 1
8.	H. Nasrullah Nukman, SH	PKS	Pdg Panjang 1
9.	Hukemri	PAN	Pdg Panjang 1
10.	Erizal, SH	PAN	Pdg Panjang 1
11.	Drs. Nasrul Efendi	Demokrat	Pdg Panjang 1
12.	Hendra Saputra	PBB	Pdg Panjang 1
13.	Yulius Kaisar	Gerindra	Pdg Panjang 2
14.	DR. H. Novi Hendri, SE, M.Si	Golkar	Pdg Panjang 2
15.	Kiki Anugerah Dia, SE	Nasdem	Pdg Panjang 2
16.	Idris	PKS	Pdg Panjang 2
17.	Mardiansyah, A.Md	PAN	Pdg Panjang 2
18.	H. Asyura Detako, ST	PAN	Pdg Panjang 2
19.	Puji Hastuti, A.md	Demokrat	Pdg Panjang 2
20.	Drs. Aditiawarman	PBB	Pdg Panjang 2

17. Kota Bukittinggi

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAPIIL
1.	Shabirin Rachmad	Gerindra	Bukittinggi 1
2.	Asri Bakar, SH	Gerindra	Bukittinggi 1
3.	H. Syafril, S.ST Par	Golkar	Bukittinggi 1
4.	Asril, SE	Nasdem	Bukittinggi 1
5.	H. Ibra Yasser	PKS	Bukittinggi 1
6.	Ibnu Azis	PKS	Bukittinggi 1
7.	Dedi Fitria	PPP	Bukittinggi 1
8.	Hj. Noni, S.Sos	PAN	Bukittinggi 1
9.	Drs. Nofrizal Usra, M.Pd	PAN	Bukittinggi 1

10.	Yontrimansyah, SE	Demokrat	Bukittinggi 1
11.	Rusdy Nurman	Demokrat	Bukittinggi 1
12.	Benny Yusrial, S.IP	Gerindra	Bukittinggi 2
13.	Muhammad Angga Alfarici	Gerindra	Bukittinggi 2
14.	Jon Edwar, ST	Golkar	Bukittinggi 2
15.	H. Syaiful Effendi, Lc, MA	PKS	Bukittinggi 2
16.	Alizarman, S.HI, SH	Demokrat	Bukittinggi 2
17.	Abdul Rahman	PKB	Bukittinggi 3
18.	Herman Syofyan	Gerindra	Bukittinggi 3
19.	Edison Katik Basa, SE	Golkar	Bukittinggi 3
20.	Zulhamdi Nofa Candra	Nasdem	Bukittinggi 3
21.	Arnis	PKS	Bukittinggi 3
22.	Nurhasra, B.Sc	PKS	Bukittinggi 3
23.	Irman H	PPP	Bukittinggi 3
24.	Ir. Hj. Rahmi Brisma	PAN	Bukittinggi 3
25.	Made Rizal, SH	Demokrat	Bukittinggi 3

18. Kota Payakumbuh

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAJIL
1.	Zainir	PKB	Payakumbuh 1
2.	Wulan Denura, S.ST	Gerindra	Payakumbuh 1
3.	Yernita	Gerindra	Payakumbuh 1
4.	H. Maharnis Zul, S.Pd	Golkar	Payakumbuh 1
5.	Ismet Harius, S.Sos	Nasdem	Payakumbuh 1
6.	Hamdi Agus, ST	PKS	Payakumbuh 1
7.	H. Suparman, S.Pd	PKS	Payakumbuh 1
8.	Ir. H. Ahmad Zifal	PPP	Payakumbuh 1
9.	Mesrawati	PAN	Payakumbuh 1
10.	Drs. Sri Joko Purwanto	Demokrat	Payakumbuh 1
11.	Mawi Etek Arianto	Gerindra	Payakumbuh 2
12.	Wirman Putra, A.Md	Golkar	Payakumbuh 2
13.	Ahmad Ridha, SH	Nasdem	Payakumbuh 2
14.	Heri ISwadi, SE Dt Rajo M Alam	PKS	Payakumbuh 2
15.	Mustafa	PKS	Payakumbuh 2
16.	h. Alhudri	PPP	Payakumbuh 2
17.	Armen Faindal, SH	Demokrat	Payakumbuh 2
18.	Syafrizal	PBB	Payakumbuh 2
19.	Aprizal M	Gerindra	Payakumbuh 3
20.	Yanuar Gazali, SE	PDI Perjuangan	Payakumbuh 3
21.	H. Yendri Bodra Dt Permato A	Golkar	Payakumbuh 3

22.	Nasrul	PKS	Payakumbuh 3
23.	Edward DF, S.Sos	PPP	Payakumbuh 3
24.	Opet Nawati	PAN	Payakumbuh 3
25.	Fahlevi Mazni	Demokrat	Payakumbuh 3

19. Kota Pariaman

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAPIL
1.	Hamdani, SH	Gerindra	Pariaman 1
2.	Life Iswar, SH	Golkar	Pariaman 1
3.	H. Iskandar, A.Md.Kep	Nasdem	Pariaman 1
4.	Aris Munandar	PKS	Pariaman 1
5.	Ikhwan Idham, SE	PPP	Pariaman 1
6.	Gusferi Akmal	PAN	Pariaman 1
7.	Fadly, ST	PBB	Pariaman 1
8.	Harpen Agus Bulyadi	Gerindra	Pariaman 2
9.	Faisal, S.Pd	Golkar	Pariaman 2
10.	Jonasri	Demokrat	Pariaman 2
11.	Asman, SH, M.Hum	PPP	Pariaman 2
12.	Riko Saputra Zein, SH	Hanura	Pariaman 2
13.	Fitri Nora, A.Md	Gerindra	Pariaman 3
14.	Ali Bakri	Golkar	Pariaman 3
15.	M. Taufik, SH	Demokrat	Pariaman 3
16.	Muhammad Yasin, STP	PKS	Pariaman 3
17.	Mulyadi	PPP	Pariaman 3
18.	Ibnu Hajar	PAN	Pariaman 3
19.	Syafaruddin	Demokrat	Pariaman 3
20.	Romi Novialdi	PBB	Pariaman 3

b. Outcome

Terpenuhinya jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota

c. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - a) Kurangnya kelengkapan administrasi terhadap pengajuan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b) Adanya keberatan dari anggota DPRD yang diganti, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan, menyebabkan proses pergantian antar waktu menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
- Solusi
 - a) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Parpol untuk melengkapi berkas administrasi calon Pergantian Antar Waktu
 - b) Menunggu proses hukum dan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah

10. Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu

a. Output

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya 6 kali rapat tim verifikasi dana hibah, 1 kali rakor persiapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 dan pemantauan tahapan pelaksanaan Pemilu di 19 kabupaten/kota se-Sumbar

Hasil Rapat Tim Verifikasi Dana Hibah

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 melaksanakan 6 kali rapat tim verifikasi bantuan dana hibah untuk Pilkada tahun 2020 dengan melibatkan KPU dan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Badan Keuangan Daerah, Bappeda, Biro Hukum, Satpol PP dan Damkar, Biro Pemerintahan, Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau, Inspektorat dan Biro Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Prov Sumbar). Adapun kesimpulan dari rapat tersebut antara lain :

- a. Rapat tanggal 23 Agustus 2019 di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov Sumbar membahas persiapan pembentukan tim verifikasi bantuan hibah dan pembahasan anggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

Hasil kesimpulan rapat :

1. Sepakat dibentuk tim evaluasi dengan Keputusan Gubernur Sumbar
2. Terkait dengan kenaggotaan tim evaluasi sepakat dengan pencantuman jabatan dan harus hadir dalam setiap rapat tim
3. Perlu ditambah keanggotaan tim evaluasi
4. NPHD dibuat oleh OPD terkait dan diteruskan ke Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau untuk diproses
5. Koordinasi dengan KPU terkait standar biaya Pilkada Tahun 2020
6. Undangan rapat dialamatkan kepada kepala OPD untuk menugaskan kepada anggota tim untuk menghadiri

- b. Rapat tanggal 23 September 2019 di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov Sumbar membahas pengajuan anggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 dari KPU Prov Sumbar.

Hasil kesimpulan rapat :

1. Perlu adanya rasionalisasi terhadap beberapa objek belanja, karena ada beberapa objek belanja yang dialokasikan pada tahun 2020
2. KPU Provinsi Sumatera Barat akan merasionalisasi belanja yang dimerahkan dalam pembahasan
3. Setelah dilakukan verifikasi maka total anggaran usulan KPU untuk tahun 2019 menjadi Rp. 3.690.458.250,-
4. Untuk usulan anggaran 2020 dibahas pada rapat berikutnya

- c. Rapat tanggal 18 September 2019 di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov Sumbar membahas pengajuan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020.

Hasil kesimpulan rapat :

1. Belanja ATK disarankan untuk dirasionalisasikan dan disatukan untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan
2. Perlu penjelasan terhadap belanja pengadaan dan penjiwaan
3. Standar biaya dalam pelaksanaan kegiatan oleh KPU dan Bawaslu mengacu pada ketentuan yang berlaku
4. Perlu adanya penjelasan terhadap volume kegiatan yang dilaksanakan
5. Perlu adanya penjelasan terhadap urgensi kegiatan yang dilaksanakan
6. Tempat pelaksanaan kegiatan tergantung jumlah peserta kegiatan (Kantor, Hotel Bintang 3 dan Hotel Bintang 4)
7. Perlu penjelasan terhadap belanja media elektronik
8. Perlu penjelasan terhadap belanja baju seragam untuk pelaksanaan event
9. Perlu penjelasan dan rasionalisasi terhadap kegiatan sosialisasi, even-event nasional, penyuluhan, bimbingan teknis

10. Perlu penjelasan terhadap lomba mascot Pilkada
 11. Perlu penjelasan mengenai jumlah TPS di 6 kabupaten/kota.
- d. Rapat tanggal 24 September 2019 (pukul 09.00 WIB s/d selesai) di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov Sumbar membahas pengajuan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020.
Hasil rapat :
1. Rasionalisasi belanja dari Rp.1.759.395.000 menjadi Rp. 1.741.994.000
 2. Selanjutnya akan diteruskan ke TAPD untuk dibahas lebih lanjut
- e. Rapat tanggal 24 September 2019 (pukul 15.00 WIB s/d selesai) di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov Sumbar membahas pengajuan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020.
Hasil rapat :
1. Usulan dari Bawaslu sebesar Rp.57.048.502.000,- setelah dilakukan pembahasan maka diperoleh hasil efisiensi menjadi Rp.51.618.758.000,-
 2. Selanjutnya akan diteruskan ke TAPD untuk dibahas lebih lanjut
- f. Rapat tanggal 25 September 2019 di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov Sumbar membahas pembahasan lanjutan pengajuan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 dari KPU Sumbar
Hasil rapat :
1. Usulan dari KPU sebesar Rp.143.723.914.928,- setelah dilakukan pembahasan maka diperoleh hasil efisiensi menjadi Rp.123.050.101.928,-
 2. Hasil pembahasan tim verifikasi hari ini selanjutnya akan diteruskan ke TAPD untuk dibahas lebih lanjut

Rakor persiapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020

Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Sumatera Barat, dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2019, bertempat di Hotel Pangeran Beach Padang. Kegiatan ini diikuti oleh 175 (seratus tujuh puluh lima) orang peserta yang terdiri dari Bupati, Walikota, Kapolres/ta, Penyelenggara Pemilu dan instansi terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Adapun materi dan narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Sumatera Barat, adalah :

1. Wakil Gubernur Sumatera Barat, sebagai Keynote Speaker, dengan materi Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dengan judul materi Kesiapan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Sumatera Barat.
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat, dengan judul materi Kesiapan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Sumatera Barat.
4. Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dengan judul materi Kesiapan Polda Sumatera Barat dalam Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Sumatera Barat.

Poin-poin penting yang disampaikan dalam rakor diantaranya :

- a) Pada tahun 2020, akan dilangsungkan Pilukada secara serentak di 11 kabupaten, 2 kota, dan Provinsi Sumatera Barat.
- b) Semua pihak harus bersinergi dan mendukung penyelenggaraan pilukada serentak agar terlaksana dengan baik dan tanpa ekses/gangguan yang berarti

- c) Diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkat pada pemilukada tahun 2020 sehingga kepala daerah terpilih memiliki legitimasi yang kuat
- d) Untuk anggaran Pilkada tahun 2020, seluruh Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah ditandatangani, meskipun untuk beberapa daerah, alokasinya tidak sesuai dengan usulan KPU.
- e) Penyelenggaraan Pemilukada menyedot anggaran yang cukup besar yakni sekitar 500 milyar rupiah. Sebelumnya, KPU mendorong agar anggaran penyelenggaraan ini ditanggung oleh APBN.
- f) KPU mengeluarkan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019. Salah satu poin perubahan dalam peraturan tersebut yakni mengakomodir penerimaan dukungan calon perseorangan yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2020 dengan syarat harus mengantongi 316.001 KTP.
- g) KPU akan melalui proses rekrutmen badan penyelenggara ad hoc dan personil mulai tanggal 15 Januari 2020 dan akan dilakukan seleksi sehingga personil penyelenggara ini merupakan orang-orang yang berintegritas, independen dan profesional.
- h) Secara umum, KPU Sumbar siap melaksanakan penyelenggaraan Pemilukada tahun 2020. KPU menghimbau agar semua unsur penyelenggara netral dan menjaga integritas dan independens
- i) Sejak tahun 2014 hingga jelang Pemilukada 2020 ini, banyak dinamika yang terjadi sepanjang proses penyelenggaraan pemilu dan Bawaslu telah menginventarisir persoalan serupa terjadi ditahun 2020. Adapun jumlah persoalan yang dirangkum oleh Bawaslu jelang Pemilukada tahun 2020 diantaranya :
 1. NPHD sudah tuntas walau alokasi yang diperoleh belum sesuai dengan usulan Bawaslu,. Meski dengan keterbatasan anggaran, Bawaslu berkomitmen akan melakukan pengawasan Pemilukada tahun 2020 dengan maksimal.
 2. Tahapan pendaftaran calon peserta tunggal.
 3. Pemutakhiran DPT.
 4. Netralitas ASN, TNI, Polri dan Penyelenggara Pemilu lainnya.
 5. Logisti Pemilu.
 6. Politik uang, berita bohong (hoax) dan politisasi SARA.
- j) Bawaslu tengah menyusun Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) agar semua pihak dapat memperoleh persepsi yang sama tentang kerawanan dimaksud.
- k) Kerawanan Pilkada mencakup :
 1. Area internal, yakni SDM, anggaran dan fasilitas pemilu;
 2. Area proses mencakup pelaksanaan Pemilukada; dan
 3. Area eksternal mencakup keamanan, sebaran hoax, perilaku masyarakat;
- l) Pada Pemilukada terjadi sebanyak 100 Pemungutan Suara Ulang (PSU). Terjadinya PSU menunjukkan indikasi ketidaksiapan penyelenggara Pemilu. PSU merupakan Potensi konflik dan perlu disikapi dengan seksama agar dapat diminimalisir pada tahun 2020.
- m) Untuk kasus menonjol pada Pemilu 2019, yaitu terbakarnya gedung penyimpanan kotak dan surat suara di Kecamatan Kota XI, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.
- n) Potensi kerawanan Pilkada lebih besar jika dibandingkan dengan Pilpres.

Pemantauan tahapan pelaksanaan Pemilu

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 melakukan pemantauan tahapan Pemilu di 19 kabupaten/kota se-Sumbar berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Prov Sumbar. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdiri dari :

1. Perencanaan Program dan Anggaran.

Perencanaan program dan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, dilaksanakan mulai tanggal 17 Agustus 2017 s.d 31 Agustus 2018.

2. Penyusunan Peraturan KPU

Penyusunan Peraturan KPU untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2017 s.d 28 Februari 2019.

3. Sosialisasi

Sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dilaksanakan mulai tanggal 17 Agustus 2017 s.d 14 April 2019.

4. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu.

Pada tanggal 3 Oktober 2017, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pendaftaran partai politik peserta Pemilu Tahun 2019, dan pada tanggal 11 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka rekapitulasi hasil verifikasi partai politik peserta Pemilu Tahun 2019.

Adapun Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa
- 2) Partai Gerakan Indonesia Raya
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 4) Partai Golongan Karya
- 5) Partai Nasdem
- 6) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
- 7) Partai Berkarya
- 8) Partai Keadilan Sejahtera
- 9) Partai Persatuan Indonesia
- 10) Partai Persatuan Pembangunan
- 11) Partai Solidaritas Indonesia
- 12) Partai Amanat Nasional
- 13) Partai Hati Nurani rakyat
- 14) Partai Demokrat
- 15) Partai Bulan Bintang
- 16) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesi

5. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten/Kota, yang terdiri dari

NO	KAB/KOTA	PPK	PPS	TPS
1.	Kab. Pesisir Selatan	15	182	1.478
2.	Kab. Solok	14	74	1.314
3.	Kab. Sijunjung	8	61	717
4.	Kab. Tanah Datar	14	75	1.249
5.	Kab. Padang Pariaman	17	103	1.359
6.	Kab. Agam	16	82	1.621
7.	Kab. Lima Puluh Kota	13	79	1.256
8.	Kab. Pasaman	12	37	915
9.	Kab. Kep. Mentawai	10	43	337
10.	Kab. Dharmasraya	11	52	666
11.	Kab. Solok Selatan	7	39	597
12.	Kab. Pasaman Barat	11	19	1.206
13.	Kota Padang	11	104	2.452
14.	Kota Solok	2	13	206
15.	Kota Sawahlunto	4	37	199
16.	Kota Padang Panjang	2	16	177
17.	Kota Bukittinggi	3	24	349
18.	Kota Payakumbuh	5	47	341
19.	Kota Pariaman	4	71	264
	JUMLAH	179	1.158	16.703

6. Penetapan Daerah Pemilihan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, telah menetapkan Daerah Pemilihan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang terdiri dari

NO	DAERAH PEMILIHAN	KAB/KOTA
1.	Sumatera Barat 1	Kota Padang
2.	Sumatera Barat 2	Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman
3.	Sumatera Barat 3	Kabupaten Agam Kota Bukittinggi
4.	Sumatera Barat 4	Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
5.	Sumatera Barat 5	Kabupaten Lima Puluh Kota Kota Payakumbuh
6.	Sumatera Barat 6	Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Dharmasraya Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang
7.	Sumatera Barat 7	Kabupaten Solok Kabupaten Solok Selatan Kota Solok
8.	Sumatera Barat 8	Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sedangkan untuk Daerah Pemilihan untuk DPR-RI pada Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	DAERAH PEMILIHAN	KAB/KOTA
1.	Sumatera Barat 1	Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Pesisir Selatan Kota Padang Kota Solok Kab. Solok Kab. Solok Selatan Kota Sawahlunto Kabupaten Sijunjung Kabupaten Dharmasraya Kota Padang Panjang Kabupaten Tanah Datar
2.	Sumatera Barat 2	Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Kota Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Kota Bukittinggi Kabupaten Agam Kota Pariaman Kabupaten Padang Pariaman

7. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

Pada tanggal 20 Juni 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilu Tahun 2019, yang terdiri dari :

NO	KAB/KOTA	DPS		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PERMPUAN	
1.	Kab. Pesisir Selatan	190.106	192.651	382.757
2.	Kab. Solok	134.410	138.235	272.645
3.	Kab. Sijunjung	76.009	77.350	153.359
4.	Kab. Tanah Datar	130.610	135.719	266.329
5.	Kab. Padang Pariaman	144.232	149.595	293.827
6.	Kab. Agam	164.541	170.351	334.892
7.	Kab. Lima Puluh Kota	128.588	135.072	263.660
8.	Kab. Pasaman	95.740	97.486	193.226
9.	Kab. Kep. Mentawai	29.537	26.795	56.332
10.	Kab. Dharmasraya	69.199	68.891	138.090
11.	Kab. Solok Selatan	55.179	55.267	110.446
12.	Kab. Pasaman Barat	124.139	127.944	252.083
13.	Kota Padang	268.305	279.494	547.800
14.	Kota Solok	21.055	21.684	42.739
15.	Kota Sawahlunto	22.446	23.062	45.508
16.	Kota Padang Panjang	18.022	18.692	36.714
17.	Kota Bukittinggi	35.361	36.626	71.987
18.	Kota Payakumbuh	43.390	44.982	88.372
19.	Kota Pariaman	29.758	30.871	60.629
	JUMLAH	1.780.627	1.830.768	3.611.395

8. Penetapan Daftar Calon Tetap

Pada tanggal 20 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu Legislatif Tahun 2019 sebagaimana daftar terlampir.

9. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

Pada tanggal 29 Agustus 2018, Komis Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 88/PK.01/BA/13/Prov/VIII/2018, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KAB/KOTA	DPTHP II		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PERMPUAN	
1.	Kab. Pesisir Selatan	162.890	167.385	330.275
2.	Kab. Solok	129.292	133.320	262.612
3.	Kab. Sijunjung	73.298	75.026	148.324
4.	Kab. Tanah Datar	126.081	131.439	257.520
5.	Kab. Padang Pariaman	138.518	144.333	282.851
6.	Kab. Agam	156.483	162.537	319.020
7.	Kab. Lima Puluh Kota	119.967	128.396	248.363
8.	Kab. Pasaman	90.785	92.925	183.710
9.	Kab. Kep. Mentawai	28975	26.180	55.155
10.	Kab. Dharmasraya	67.532	67.403	134.935
11.	Kab. Solok Selatan	54.096	54.050	108.146
12.	Kab. Pasaman Barat	122.764	125.493	248.257
13.	Kota Padang	269.799	282.018	551.817
14.	Kota Solok	21.042	21.820	42.862
15.	Kota Sawahlunto	22.520	23.140	42.862
16.	Kota Padang Panjang	18.221	18.877	37.098
17.	Kota Bukittinggi	35.760	37.009	72.769
18.	Kota Payakumbuh	42.348	44.247	86.595

19.	Kota Pariaman	30.113	31.229	61.342
	JUMLAH	1.710.484	1.766.827	3.477.311

Pada tanggal 14 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), yang ditetapkan dengan Berita Acara Nomor : 97/PK.01-BA/13/Prov/IX/2018, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KAB/KOTA	DPTHP II		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PERMPUAN	
1.	Kab. Pesisir Selatan	162.654	167.163	329.817
2.	Kab. Solok	129.012	133.140	262.152
3.	Kab. Sijunjung	72.641	74.450	147.091
4.	Kab. Tanah Datar	125.672	131.010	256.682
5.	Kab. Padang Pariaman	136.984	143.123	280.107
6.	Kab. Agam	156.342	162.444	318.786
7.	Kab. Lima Puluh Kota	119.819	128.272	248.091
8.	Kab. Pasaman	90.898	93.087	183.985
9.	Kab. Kep. Mentawai	28.994	26.157	55.151
10.	Kab. Dharmasraya	67.197	67.106	134.303
11.	Kab. Solok Selatan	54.191	54.126	108.317
12.	Kab. Pasaman Barat	120.089	123.452	243.541
13.	Kota Padang	269.129	281.607	550.736
14.	Kota Solok	20.877	21.709	42.586
15.	Kota Sawahlunto	22.492	23.122	45.614
16.	Kota Padang Panjang	18.202	18.870	37.072
17.	Kota Bukittinggi	35.478	36.770	72.248
18.	Kota Payakumbuh	42.321	44.231	86.552
19.	Kota Pariaman	30.104	31.217	61.321
	JUMLAH	1.703.096	1.761.056	3.464.152

Pada tanggal 14 November 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan II Pemilu Tahun 2019, dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor : 49/PL.03.1-Kpt/Prov/XI/2018, yang terdiri dari :

NO	KAB/KOTA	DPTHP II		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PERMPUAN	
1.	Kab. Pesisir Selatan	163.207	167.752	330.959
2.	Kab. Solok	140.582	142.677	283.259
3.	Kab. Sijunjung	75.831	77.196	153.027
4.	Kab. Tanah Datar	129.611	134.801	264.412
5.	Kab. Padang Pariaman	154.054	157.819	311.873
6.	Kab. Agam	174.264	179.646	353.910
7.	Kab. Lima Puluh Kota	122.789	131.156	253.945
8.	Kab. Pasaman	93.552	95.832	189.384
9.	Kab. Kep. Mentawai	29.531	26.675	56.206
10.	Kab. Dharmasraya	71.061	70.564	141.625
11.	Kab. Solok Selatan	57.128	56.929	114.057
12.	Kab. Pasaman Barat	123.297	126.529	249.826
13.	Kota Padang	285.401	297.794	583.195
14.	Kota Solok	23.136	23.861	46.997
15.	Kota Sawahlunto	22.590	23.239	45.829
16.	Kota Padang Panjang	19.086	19.777	38.863
17.	Kota Bukittinggi	37.214	38.298	75.512
18.	Kota Payakumbuh	42.706	44.582	87.288
19.	Kota Pariaman	30.260	31.334	61.594
	JUMLAH	1.795.300	1.846.461	3.641.761

Pada tanggal 12 Desember 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan II Pemilu Tahun 2019, dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari :

NO	KAB/KOTA	PENYEMPURNAAN DPTHP II		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PERMPUAN	
1.	Kab. Pesisir Selatan	163.386	167.874	331.260
2.	Kab. Solok	139.896	142.006	281.902
3.	Kab. Sijunjung	77.741	78.620	156.361
4.	Kab. Tanah Datar	136.146	140.469	276.615
5.	Kab. Padang Pariaman	155.446	158.541	313.987
6.	Kab. Agam	180.307	184.722	365.029
7.	Kab. Lima Puluh Kota	129.250	135.911	265.161
8.	Kab. Pasaman	98.979	100.857	199.836
9.	Kab. Kep. Mentawai	32.772	30.331	63.103
10.	Kab. Dharmasraya	72.338	71.569	143.907
11.	Kab. Solok Selatan	57.207	56.954	114.161
12.	Kab. Pasaman Barat	123.846	126.877	250.723
13.	Kota Padang	290.588	301.574	592.162
14.	Kota Solok	23.388	24.030	47.418
15.	Kota Sawahlunto	22.564	23.214	45.778
16.	Kota Padang Panjang	19.043	19.738	38.781
17.	Kota Bukittinggi	40.153	41.294	81.447
18.	Kota Payakumbuh	43.594	45.255	88.849
19.	Kota Pariaman	30.331	31.292	61.623
	JUMLAH	1.836.975	1.881.128	3.718.103

Pada tanggal 19 Februari 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 14/PL.01.2-BA/13/Prov/II/2019, yang terdiri dari :

NO	KAB/KOTA	DPTb		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PERMPUAN	
1.	Kab. Pesisir Selatan	163.350	267.835	331.185
2.	Kab. Solok	139.798	141.891	281.689
3.	Kab. Sijunjung	77.896	78.722	156.618
4.	Kab. Tanah Datar	136.040	140.361	276.401
5.	Kab. Padang Pariaman	155.446	158.520	313.966
6.	Kab. Agam	180.343	184.675	365.018
7.	Kab. Lima Puluh Kota	129.219	135.863	265.082
8.	Kab. Pasaman	98.991	100.871	199.862
9.	Kab. Kep. Mentawai	32.769	30.319	63.088
10.	Kab. Dharmasraya	72.359	71.586	143.945
11.	Kab. Solok Selatan	57.275	56.977	114.252
12.	Kab. Pasaman Barat	123.796	126.843	250.639
13.	Kota Padang	290.234	301.668	591.902
14.	Kota Solok	23.430	24.012	47.442
15.	Kota Sawahlunto	22.611	23.2009	45.442
16.	Kota Padang Panjang	19.075	19.757	38.832
17.	Kota Bukittinggi	40.000	41.217	81.217
18.	Kota Payakumbuh	43.540	45.195	88.735
19.	Kota Pariaman	30.281	31.339	61.620
	JUMLAH	1.836.453	1.880.860	3.717.313

Pada tanggal 12 April 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 26/PL.01.2-BA/13/Prov/IV/2019, yang terdiri dari :

NO	KAB/KOTA	DPTHP-3		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PERMPUAN	
1.	Kab. Pesisir Selatan	163.386	267.874	331.260
2.	Kab. Solok	139.896	142.006	281.902
3.	Kab. Sijunjung	77.853	78.742	156.615
4.	Kab. Tanah Datar	136.146	140.469	276.615
5.	Kab. Padang Pariaman	155.446	158.541	313.987
6.	Kab. Agam	180.307	184.722	365.029
7.	Kab. Lima Puluh Kota	129.250	135.911	265.161
8.	Kab. Pasaman	98.979	100.857	199.836
9.	Kab. Kep. Mentawai	32.772	30.331	63.103
10.	Kab. Dharmasraya	72.338	71.569	143.907
11.	Kab. Solok Selatan	57.207	56.954	114.161
12.	Kab. Pasaman Barat	123.846	126.877	250.723
13.	Kota Padang	290.558	301.574	592.162
14.	Kota Solok	23.388	24.030	47.418
15.	Kota Sawahlunto	22.564	23.214	45.778
16.	Kota Padang Panjang	19.043	19.738	38.781
17.	Kota Bukittinggi	40.153	41.294	81.447
18.	Kota Payakumbuh	43.594	45.225	88.849
19.	Kota Pariaman	30.231	31.292	61.523
	JUMLAH	1.836.987	1.881.250	3.718.237

10. Kampanye Pemilu Tahun 2019

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka masa kampanye dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.

11. Pengadaan dan Pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2019

Pengadaan dan Pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2019, dilaksanakan mulai tanggal 17 April 2018 s.d 16 April 2019.

12. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019.

Pada tanggal 17 April 2019, telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 di Sumatera Barat

13. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019.

Pada tanggal 8 s.d 12 Mei 2019, bertempat di Hotel Pangeran Beach Padang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, dengan hasil sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/ KOTA	DPT, DPTb, DPK	JOKOWI - M. AMIN		PRABOWO - SANDI		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL SUARA	PARTI SIPASI
			JUMLAH	%	JUMLAH	%				
1	KAB. PESISIR SELATAN	347,038	36,900	13.82	230,042	86.18	266,942	3,442	270,384	77.91
2	KAB. SOLOK	292,761	17,865	8.67	188,198	91.33	206,063	3,872	209,935	71.71
3	KAB. SIJUNJUNG	161,514	15,705	12.49	110,012	87.51	125,717	1,713	127,430	78.90
4	KAB. TANAH DATAR	286,001	22,273	11.24	175,855	88.76	198,128	3,072	201,200	70.35
5	KAB. PADANG PARIAMAN	323,847	20,587	9.60	193,899	90.40	214,486	3,730	218,216	67.38
6	KAB. AGAM	376,988	25,520	9.93	231,561	90.07	257,081	3,853	260,934	69.22
7	KAB. LIMA PULUH KOTA	270,850	25,662	12.17	185,265	87.83	210,927	3,893	214,820	79.31
8	KAB. PASAMAN	206,510	13,642	8.51	146,717	91.49	160,359	2,558	162,917	78.89
9	KAB. KEP. MENTAWAI	65,401	41,116	81.70	9,211	18.30	50,327	465	50,792	77.66
10	KAB. DHARMASRAYA	151,543	38,773	30.69	87,568	69.31	126,341	1,760	128,101	84.53
11	KAB. SOLOK SELATAN	121,387	14,124	15.17	79,007	84.83	93,131	1,710	94,841	78.13
12	KAB. PASAMAN BARAT	272,153	34,418	15.78	183,643	84.22	218,061	2,887	220,948	81.19
13	KOTA PADANG	626,714	63,491	13.50	406,698	86.50	470,189	3,693	473,882	75.61
14	KOTA SOLOK	50,193	4,955	12.21	35,610	87.79	40,565	422	40,987	81.66
15	KOTA SAWAHLUNTO	47,190	7,077	18.42	31,341	81.58	38,418	600	39,018	82.68
16	KOTA PADANG PANJANG	39,867	3,993	12.62	27,645	87.38	31,638	341	31,979	80.21
17	KOTA BUKITTINGGI	86,553	7,896	12.55	55,011	87.45	62,907	609	63,516	73.38
18	KOTA PAYAKUMBUH	92,131	9,564	12.93	64,408	87.07	73,972	1,009	74,981	81.39
19	KOTA PARIAMAN	63,746	4,200	8.20	47,042	91.80	51,242	596	51,838	81.32
	JUMLAH	3,882,387	407,761	14.08	2,488,733	85.92	2,896,494	40,225	2,936,71	75.64

14. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD

Pada tanggal 14 Agustus 2019 KPU Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan calon terpilih

15. Pelantikan Anggota Dprd Provinsi Dan Kabupaten/Kota

NO	PROVINSI DAN KAB/KOTA	TANGGAL PELANTIKAN
1.	Provinsi Sumatera Barat	28 Agustus 2019
2.	Kab. Solok	13 Agustus 2019
3.	Kab. Sijunjung	13 Agustus 2019
4.	Kab. Padang Pariaman	14 Agustus 2019

5	Kab. Agam	20 Agustus 2019
6.	Kab. Lima Puluh Kota	06 Agustus 2019
7.	Kab. Pasaman	12 Agustus 2019
8.	Kab. Kepulauan Mentawai	01 September 2019
9.	Kab. Dharmasraya	14 Agustus 2019
10.	Kab. Solok Selatan	14 Agustus 2019
11.	Kab. Pasaman Barat	18 Agustus 2019
12.	Kab. Pesisir Selatan	14 Agustus 2019
13.	Kab. Tanah Datar	14 Agustus 2019
14.	Kota Pariaman	14 Agustus 2019
15.	Kota Sawahlunto	12 Agustus 2019
16.	Kota Padang Panjang	13 Agustus 2019
17.	Kota Solok	07 Agustus 2019
18.	Kota Bukittinggi	07 Agustus 2019
19.	Kota Payakumbuh	01 September 2019
20.	Kota Padang	14 Agustus 2019

b. Outcome

Pemilu berjalan dengan aman, tertib dan lancar

c. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 1. Adanya keberatan dari partai politik terkait daftar calon tetap Anggota Legislatif.
 2. Adanya keberatan dari calon anggota DPD yang dibatalkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, dan menyampaikan keberatan ke Bawaslu ke Provinsi Sumatera Barat, namun telah diselesaikan dan calon tersebut dapat ditetapkan menjadi Calon Tetap DPD dari Provinsi Sumatera Barat.
 3. Terkait Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat 205 pelanggaran, yang terdiri dari 132 laporan pelanggaran dan 73 temuan pelanggaran
 4. Masih terdapatnya Alat Peraga Kampanye yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang atau tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.
 5. Meninggalnya anggota KPPS pasca pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak Tahun 2019, dengan rincian 10 orang anggota KPPS dan 1 orang Petugas Pengawas Lapangan, sebagaimana daftar terlampir.
 6. Pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten/Kota
- Solusi

Melakukan koordinasi yang intensif dengan penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan KPU) dan Pemerintah Daerah terkait proses tahapan Pemilu agar berjalan aman, tertib dan lancar

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan Yang Terjadi (*konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya*)

Gangguan yang terjadi di Sumatera Barat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) KUHP dan revisi UU KPK oleh pemerintah pusat.

Pada bulan September 2019, sebagian besar masyarakat menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah mengesahkan sejumlah RUU diantaranya RUU KUHP dan revisi UU KPK. Penolakan tersebut berbuntut aksi unjuk rasa yang masif dan intens terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sumbar. Aksi unjuk rasa di Sumbar dilakukan sejak bulan September 2019 dengan berbagai macam tuntutan terhadap pemerintah. Aksi unjuk rasa terjadi di depan kantor-kantor pemerintah daerah hampir di semua kabupaten/kota di Sumbar.

Pada tanggal 25 September 2019, aliansi BEM se- Sumbar kembali melakukan aksi unjuk rasa didepan gedung DPRD Prov. Sumbar di jalan Khatib Sulaiman, Padang. Aksi unjuk rasa tersebut menuntut pemerintah pusat untuk membatalkan pengesahan RUU KUHP dan revisi UU KPK. Aksi semula berjalan dengan tertib. Sejumlah pimpinan DPRD Prov. Sumbar turun menemui mahasiswa untuk mendengarkan dan menyalurkan aspirasi/tuntutan yang disampaikan. Pada sore hari, sejumlah perwakilan mahasiswa merangsek masuk ke ruang sidang utama dan mulai melakukan aksi aksi pengrusakan terhadap fasilitas yang ada di dalam gedung. Aksi menjadi anarkis dan tak terkendali dan sejumlah oknum mahasiswa melakukan pengrusakan yang menyebabkan hampir semua prasarana di ruang sidang utama mengalami kerusakan berat. Kerugian yang ditaksir mencapai 1 milyar rupiah. Aparat keamanan berhasil membubarkan paksa aksi mahasiswa menjelang malam hari.

- b) Aksi perusakan kendaraan dinas oleh masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar pada kegiatan operasi penerbitan alat tangkap bagan dan keramba jaring apung (KJA) di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar
- Pemasangan bagan dan KJA di Danau Singkarak menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat sekitar. Setelah adanya pemasangan bagan dan KJA di Danau Singkarak, Solok, diketahui ada reaksi dari nelayan lokal dan masyarakat yang tidak menginginkan adanya bagan bagan tersebut. Masyarakat lokal menilai, pemasangan bagan dapat menyebabkan punahnya ekosistem ikan bilih di danau Singkarak. Namun ada kelompok masyarakat lain yang mendukung pemasangan bagan. Adanya dua kelompok yang saling berseberangan ini dikhawatirkan memicu potensi konflik. Menanggapi situasi tersebut, setelah melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait, pemerintah provinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur penertiban bagan dan KJA di danau Singkarak. Penertiban bagan dan KJA tersebut dilakukan pada tanggal 23 dan 24 September 2019 dan berjalan dengan tertib. Pasca penertiban bagan, masih ditemukan adanya oknum yang kembali memasang bagan dan KJA di Danau Singkarak sehingga memunculkan reaksi dari masyarakat. Hingga saat ini, situasi di sekitar Danau Singkarak masih dalam pemantauan pemerintah prov. Sumbar maupun pemkab Solok.
- c) Perusakan tapal batas Nagari Kepencong Lubuk Gambir (Kapelgam) dengan Koto Baru oleh masyarakat Nagari Kapelgam terkait peristiwa kepemilikan lahan. Peristiwa ini terjadi di Nagari Keponcolng Lubuk Gambir, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 26 November 2019.
- d) Bentrok antar warga Nagari Sumpur dengan warga Bungo Tanjung terkait persoalan tapal batas nagari dipicu oleh pemancangan tanah di daerah tapal batas oleh warga Bungo Tanjung yang diprotes oleh warga nagari Sumpur, mengakibatkan 3 orang terluka akibat senjata tajam dan dilarikan ke RSUD Padang Panjang, 1 dirujuk ke RSUD M.Djamil Padang. Peristiwa ini terjadi di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 5 Desember 2019.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

SKPD yang menangani penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat per Desember 2019 berjumlah 45 orang dengan susunan sebagai berikut :

I. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

1. S2 : 7 orang
2. S1 : 21 orang
3. DIII : 1 orang
4. SLTA : 16 orang

II. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel
Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	NAMA PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
GOLONGAN IV				
1	Pembina Utama	IV	E	
2	Pembina Utama Madya	IV	D	1
3	Pembina Utama Muda	IV	C	
4	Pembina Tingkat I	IV	B	4
5	Pembina	IV	A	4
GOLONGAN III				
1	Penata Tingkat I	III	D	9
2	Penata	III	C	7
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	8
4	Penata Muda	III	A	6
GOLONGAN II				
1	Pengatur Tingkat I	II	D	
2	Pengatur	II	C	3
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	2
4	Pengatur Muda	II	A	1
TOTAL				45

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada tahun anggaran 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi belanja dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp.11.973.938.770** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp.5.314.953.288** dan belanja langsung sebesar **Rp.6.658.985.482**. Adapun realisasinya pada akhir Desember 2019 untuk belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.926.868.120 (92,69%)** sedangkan realisasi belanja langsung sebesar **Rp.6.510.963.435 (97,78%)**. Jumlah total realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung per Desember 2019 sebesar **Rp.11.437.831.555** tau **95,52%**.

5. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan dan penguatan fungsi intelijen dalam melakukan deteksi dan cegah dini terkait persoalan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
Kendala : Keterbatasan jumlah intelijen sehingga fungsi intelijen belum optimal
- b. Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk menjangkau, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG dan memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah.
Kendala : Masih banyak kabupaten/kota yang belum membentuk TKDPD dan FKDM karena keterbatasan alokasi anggaran sehingga fungsi TKDPD dan FKDM di tingkat Provinsi belum maksimal
- c. Pembentukan Forum Diskusi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Barat). Tugas-tugas Forkopimda diantaranya melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah langkah yang dipandang perlu baik bersifat pencegahan maupun penanggulangannya.
- d. Penguatan fungsi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam mendeteksi dan menangani potensi ATHG terhadap stabilitas keamanan.
Kendala : Terbatasnya jumlah SDM dan alokasi anggaran dalam penyusunan rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban, koordinasi dan pelibatan instansi terkait selalu dilakukan, sehingga penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan secara optimal. Aparat yang terlibat meliputi Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat instansi terkait.

Padang, Desember 2019

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA**


NAZWIR, SH, M. Hum

Pembina Utama Madya

Nip.19641111 199003 1 008

